

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK TERHADAP NASABAH YANG  
TERKENA DAFTAR HITAM AKIBAT KESALAHAN BANK  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam  
Ilmu Hukum

Oleh :

**SAFIRA AMALIA SANI  
NIM. 155010112111001**



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2018**

**HALAMAN PENGESAHAN****SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK TERHADAP NASABAH YANG TERKENA  
DAFTAR HITAM AKIBAT KESALAHAN BANK (Studi Putusan Mahkamah Agung  
Nomor 1527 K/Pdt/2015)**

**SAFIRA AMALIA SANI**

**NIM : 155010112111001**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 05 September 2018 dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr.Sihabudin,S.H.,M.H.

Dr.Reka Dewantara ,S.H.,M.H.

NIP. 195912161985031001

NIP. 198305022008121003

Mengetahui,

Ketua Bagian

Dekan Fakultas Hukum

Hukum Perdata

Dr.Rachmad Safa'at, S.H.,M.Si.

Dr. Budi Santoso, S.H.,LLM.

NIP.196208051988021001

NIP.197206222005011002



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

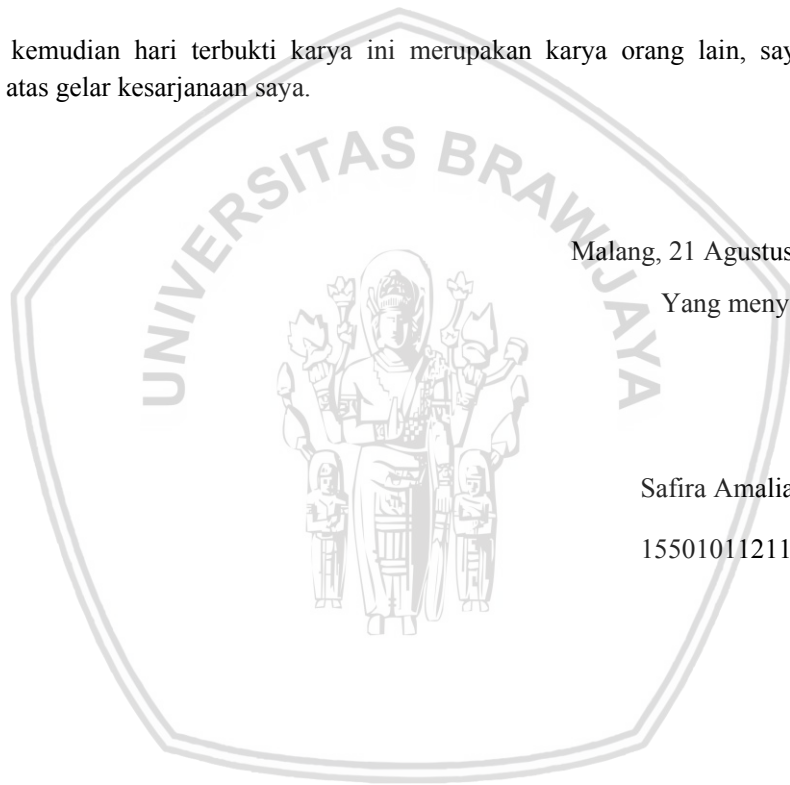
Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 21 Agustus 2018

Yang menyatakan,

Safira Amalia Sani

155010112111001



## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT, atas segala rahmat serta syafaat-Nya sehingga skripsi berjudul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK TERHADAP NASABAH YANG TERKENA DAFTAR HITAM AKIBAT KESALAHAN BANK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015)”** ini dapat selesai dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moril maupun materiil, untuk itu penulis dengan berbahagia mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Suci, Pemilik Samudera Ilmu, atas segala pertolongan dan kasih sayang-Nya bagi kita semua, utamanya bagi penulis;
2. Rasulullah Muhammad SAW, atas ajaran dan sunnah-sunnah beliau yang begitu menginspirasi dan membawa kita semua menuju jalan yang lurus, jalan kebenaran;
3. Ayah Penulis, Eko Susanto, dan Ibu Penulis Evi Handajani, S.E yang begitu penulis cintai dan banggakan, karena kasih sayang, semangat, doa dan ajaran-ajaran beliau yang begitu menginspirasi, serta semua dukungan moril maupun materiil yang telah beliau berdua berikan kepada penulis sampai saat ini, semoga menjadikan ampunan dan keberkahan bagi beliau berdua, serta menjadikan kedudukan tinggi lagi mulia bagi beliau berdua di dunia dan di akhirat;
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Yang Terpelajar Bapak Dr.Rachmad Safa'at,S.H,M.Si;
5. Kepala Bagian Hukum Perdata, Yang Terpelajar Bapak Dr.Budi Santoso, S.H.,LLM;
6. Dosen Pembimbing penulis yang selalu menginspirasi, memotivasi, dan dengan sabar membimbing penulis hingga menyelesaikan skripsi nya,

Yang Terpelajar Bapak Dr. Sihabudin, S.H.,M..H dan Yang Terpelajar Bapak Dr. Reka Dewantara, S.H.,M.H, semoga ilmu yang didapatkan dari beliau berdua bermanfaat bagi masa depan penulis;

7. Teman-Teman tersayang di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang selalu memberikan semangat, bantuan, motivasi dan juga nasihat, Resti Catur Wedar Sari, Fahmi Widi Waspada, Opi Lerionika, Intan Baitul Izza, Novia Dewi Aprilia, Megasari Dwi Jayanti, Rafika Nurul Wardha, Sinta Rahma Desiarti, Soraya Hafidzah Rambe, Nabila Nurussifa; dll
8. Sahabat terbaik penulis sejak SMA, tempat mencurahkan lika-liku perjuangan semasa skripsi, Hendy Adhitama, Desta Trisna Astika, Rachel Nitrogena Virdani, Rona Ripmawati, Eni Faristin, Cynta, Widiyasari, Kartika Putri, Novendi, terimakasih tak terhingga telah setia menemani dan mendukung setiap perjalanan kehidupan penulis;
9. Aidelia Citra Faradina, teman seperjuangan memperoleh gelar Sarjana Hukum, mulai dari bimbingan skripsi hingga akhirnya yudisium;
10. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan selama proses pengerjaan skripsi, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis yakin bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga segala masukan maupun kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Malang, Agustus 2018

Penulis

## RINGKASAN

Safira Amalia, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2018, TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK TERHADAP NASABAH YANG TERKENA DAFTAR HITAM AKIBAT KESALAHAN BANK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015), Dr.Sihabudin, S.H.,M..H dan Dr. Reka Dewantara, S.H.,M.H.

Bank sebagai salah satu lembaga penyedia jasa keuangan tidak menutup kemungkinan melakukan kesalahan. Salah satu nya adalah kesalahan dalam penjatuhan daftar hitam perbankan kepada nasabah nya. Bank diwajibkan melakukan tanggung jawab hukum atas kelalaian yang telah dilakukan oleh pihak nya saat telah terbukti melakukan kesalahan. Namun, di dalam KUHPerdata konsep ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum tidak dijelaskan secara rinci seperti hal nya konsep ganti kerugian akibat wanprestasi yang telah mengatur mengenai jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut. Sehingga penggugat dalam perkara perbuatan melawan hukum dapat kemudian menggugat secara materiil dan *immateriil*. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian *immateril* diserahkan kepada hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian *immateril* yang akan dikabulkan karena tolak ukur nya diserahkan kepada subjektifitas hakim yang memutus perkara

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apakah putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015 telah sesuai dengan kitab undang-undang hukum perdata terkait dengan ganti rugi yang disebabkan akibat perbuatan melawan hukum dan bagaimana tanggung jawab hukum bank bagi nasabah yang terkena daftar hitam akibat kesalahan bank

Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut dan studi kepustakaan, jurnal hukum serta artikel ilmiah online. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan metode interpretasi sistematis sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih terstruktur guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015 menolak kasasi pemohon kasasi dahulu tergugat atau terbanding. Dalam Putusan sebelumnya, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 84/Pdt G/2014/PN Skt yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 424/Pdt/2014/PT.SMG hakim memutuskan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat baik secara formil maupun secara materiil. Putusan hakim tersebut telah sesuai dengan undang-undang yaitu memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur mengenai ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. 2) Tanggung jawab hukum yang dilakukan Bank Mandiri (Persero) Tbk, kantor cabang Solo, Sriwedari akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepada nasabahnya yaitu tanggung jawab berdasarkan KUHPerdata, berupa ganti kerugian yang mengacu kepada pasal 1365 KUHPerdata yaitu pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang. Majelis hakim mempertimbangkan keadaan atau status sosial ekonomi dan martabat penggugat sebagai seorang pengusaha *mebeler*, meja, kursi, kusen dan sebagainya, dalam suatu usaha yang diberi nama UD. Anugerah, majelis hakim berpendapat bahwa sudah pantas apabila tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) sebagai pemulihan nama baiknya, sebagai pengganti keuntungan yang diharapkan dan sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan oleh penggugat untuk mengurus masalahnya dengan tergugat.

## SUMMARY

Safira Amalia, Business Civil Law, *Faculty of Law Brawijaya University, August 2018, Liability of Bank regarding Blacklisted Bank Client due to Mistake made by a Bank (A study on Decision of Supreme Court Number 1527 K/Pdt/2015)*, Dr.Sihabudin, S.H., M.H and Dr.Reka Dewantara, S.H., M.H.

*Banks known as financial service providers sometimes make mistake. The mistake can also take blacklisting by banks toward their clients. Banks are responsible for the liability regarding their negligence that affects their clients. However, unlike the compensation paid for breach of contract, Civil Code does not provide any details of compensation for the tort of blacklisting committed. The compensation regarding breach of contract also comes with the period of the amount of compensation that can be charged, allowing a plaintiff to materially and immaterially sue the party committing the tort. In reality, the fulfilment of the charge regarding the immaterial loss caused is left in the hand of the judge with the principle of ex aquo et bono. This leads to another hindrance in terms of determining the immaterial loss granted because the benchmark of this case depends on the subjectivity of the judge who gave verdict.*

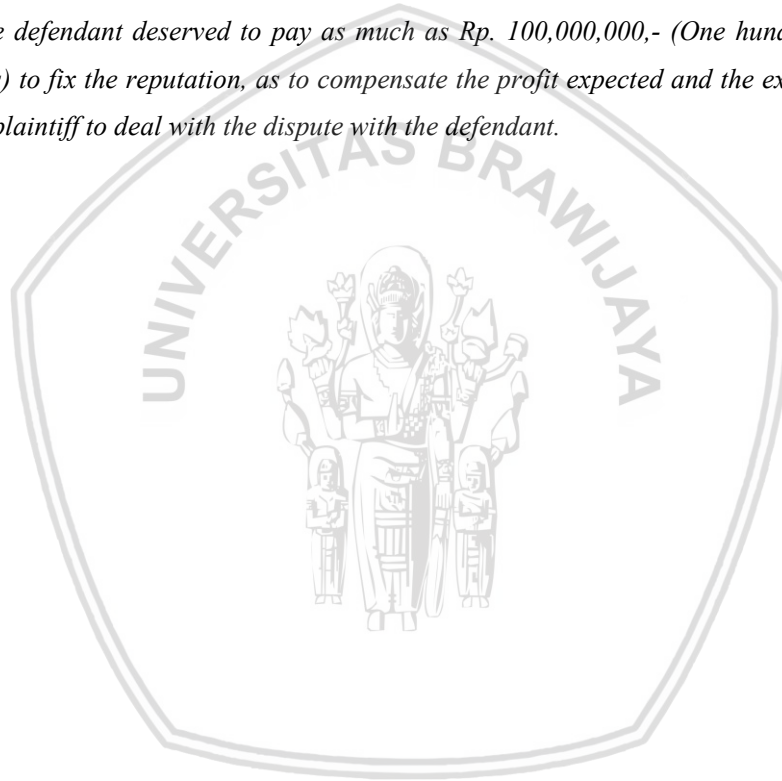
*Based on the issues mentioned above, research problems are presented in this research: Is the court ruling of Supreme Court Number 1527 K/Pdt/2015 relevant to Civil Code when it is linked to compensation caused by the tort of blacklisting mistakenly done by banks? And how is the liability of the banks performed regarding the blacklisting that disadvantaged the bank clients?*

*Normative legal research was employed in this research with statute, analytical, and case approaches. Legal materials used in this research were obtained from Acts, literature reviews, and online scientific articles. The obtained data was then analysed by applying grammatical and systematic interpretation, followed by the presentation of more structural research writing to give answers of the legal issues discussed in this research.*

*The discussion of the issues bring to the following results: 1) the judge, regarding the court ruling of Supreme Court Number 1527 K/Pdt/2015 rejects the appeal proposed by the plaintiff. In the previous ruling, the ruling of District Court Number 84/Pdt G/2014/PN Skt supported by the ruling of District Court of Semarang Number*



424/Pdt/2014/PT.SMG, the judge decided that the defendant had committed a tort that caused loss for the plaintiff formally and materially. The decision made is in line with the an Act, which meets the crucial points in Article 1365 of Civil Code that regulate losses caused by torts. 2) The liability that should be under the responsibility of Bank Mandiri (Persero) Tbk, branch office of Solo is to give compensation based on what is enacted in Civil Code and as relevant to Article 1365 of Civil Code where the compensation should be given in the form of money. The judge considered the financial condition of the defendant selling furniture under the company name UD Anugrah. The judge believed that the defendant deserved to pay as much as Rp. 100,000,000,- (One hundred million rupiahs) to fix the reputation, as to compensate the profit expected and the expense spent by the plaintiff to deal with the dispute with the defendant.



## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .....	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Ringkasan.....	vi
<i>Summary</i> .....	viii
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Sistematika Penulisan .....	20
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Bank.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Bank .....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan.....	42
D. Tinjauan Umum Tentang Daftar Hitam Perbankan .....	47
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	50
B. Pendekatan Penelitian .....	51
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	53
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	56
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	56
F. Definisi Konseptual .....	57
 <b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015 Mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Bank Kepada Nasabah Dalam Kasus Kesalahan Penjatuhan Daftar Hitam Perbankan Oleh Bank Mandiri Kepada Sutrisno .....	59
A.1 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1527 K/Pdt/2015 .....	70
A.2 Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015 Terhadap Pihak Bank dan Nasabah.....	90
B. Tanggung Jawab Hukum Bank Terhadap Nasabah yang Terkena Daftar Hitam Akibat Kesalahan Bank .....	105
B.1 Penyebab Bank Melakukan Kesalahan dalam Pelaporan Informasi Keuangan .....	105



B.2 Tanggung Jawab Hukum Bank Kepada Nasabah Atas Kelalaian Penjatuhan Daftar Hitam .....	108
--	-----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	125
B. Saran .....	126

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	128
-----------------------------	-----

**LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel. 1 Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel. 2 Putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan kasasi dalam kasus Sutrisno melawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor cabang Solo Sriwedari .....	98



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Lembaga perbankan termasuk kedalam salah satu lembaga penyedia jasa keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian negara Indonesia. Lembaga perbankan memiliki peranan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang memiliki kelebihan secara finansial (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang mengalami kekurangan secara finansial (*lack of funds*). Hal tersebut sejalan dengan apa yang tertuang di dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa perbankan memiliki fungsi utama sebagai penghimpun serta penyalur dana milik masyarakat.

Aktivitas Ekonomi dapat berjalan dengan lancar dan baik karena adanya unsur kepercayaan. Unsur kepercayaan ini muncul dikarenakan adanya pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Yaitu konsumen sebagai pemakai barang dan jasa dan produsen sebagai pihak yang memproduksi barang dan jasa tersebut. Dalam hal ini, konsumen adalah nasabah yang menggunakan jasa perbankan, dan produsen atau pelaku usaha diartikan adalah bank itu sendiri yang menyediakan jasa berupa penyediaan dana. Bank di dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat mendasarkan atas prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) dan sifat hubungan hukumnya sebagai hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*). Maka, Bank kemudian sering disebut

juga sebagai (*fiduciary institution*). Prinsip kepercayaan merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dalam pengelolaan industri perbankan<sup>1</sup>.

Bank sebagai *Financial intermediaris* antara unit *surplus of fund* dengan unit *lack of fund* menimbulkan munculnya interaksi antara bank yang bertindak sebagai sebagai pelaku usaha dengan nasabah-nasabah bank sebagai konsumen dari jasa perbankan tersebut, maka dari itu hak-hak dari nasabah harus dipenuhi oleh pihak bank ketika nasabah tersebut mempercayakan untuk menggunakan produk perbankan. Bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, dengan demikian perbankan akan dijauhi apabila kepercayaan itu tidak terpenuhi.<sup>2</sup>

Hubungan antara bank dan nasabah termasuk kedalam hubungan kontraktual antara pihak debitur dan kreditur yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian, dengan tujuan supaya bank yang menggunakan uang debitur atau nasabahnya tersebut akan membayar kembali dana yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh penyimpannya. Demikian pula hal-hal yang menyangkut hubungan antara bank dan nasabah yang berperan sebagai pihak debitur termasuk ke dalam hubungan kepercayaan. Hal ini dikatakan demikian karena bank akan memberikan kredit kepada nasabah atas kepercayaan bahwa nasabah mampu dan mau membayar kembali kreditnya tersebut.<sup>3</sup> Hal tersebut Sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, yang menyebutkan bahwa :

---

<sup>1</sup> Nindyo Pramono, **Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual**, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2006), hlm 243-244.

<sup>2</sup> Bambang Suprayitno, “**Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah dan Bank Serta Konsep Ke Depan**nya”, (Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 5, Nomor 2, Desember, 2008), hlm.204.

<sup>3</sup> Etty Mulyati, **Kredit Perbankan**, (Bandung:PT.Refika Aditama, 2016), hlm. 69.

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.<sup>4</sup>

Rangkaian dari prinsip kehati-hatian yang dianut oleh perbankan diantaranya antara lain adalah prinsip mengenal Nasabah (*Knows Your Customers Principle*).<sup>5</sup>

Bank Indonesia, sebelumnya merupakan sebuah otoritas yang memegang kewenangan dalam pengelolaan sistem informasi nasabah sebagai pihak yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan, namun setelah diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur, pada bulan April tahun 2017 kewenangan dalam melakukan pengelolaan sistem informasi nasabah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Hal tersebut mengakibatkan peraturan yang lama yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sistem Layanan Informasi Keuangan memuat Laporan keuangan Debitur menggantikan Sistem Informasi Debitur. Menurut Pasal 4 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Laporan Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, Laporan Debitur mencakup mengenai informasi mengenai debitur,

---

<sup>4</sup>Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>5</sup>Yunus Husein, “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering”, (Jurnal Hukum Bisnis, 16 November 2001), hlm.33.

fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin, pengurus dan pemilik dan keuangan debitur itu sendiri yang menjadi pokoknya.<sup>6</sup> Laporan Debitur sebagaimana yang dimaksud harus disusun dengan berpedoman kepada pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan<sup>7</sup>, yang menurut pasal 10 disebutkan bahwa:

“pelapor yang akan menyampaikan laporan debitur dan/atau koreksi laporan debitur hanya dapat menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan debitur tersebut melalui sebuah mekanisme secara *online* melalui SLIK.”<sup>8</sup>

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) merupakan suatu bentuk peraturan baru yang merupakan perluasan dari Sistem Informasi Debitur yang dahulu nya merupakan kewenangan dari Bank Indonesia. SLIK dibangun agar menjadi sebuah sarana yang akan memberikan hal-hal yang menyangkut mengenai pertukaran informasi pembiayaan atau perkreditan antar lembaga di bidang keuangan dan bertujuan membantu menurunkan tingkat resiko kredit bermasalah, karena SLIK merupakan inovasi yang dilakukan oleh OJK seiring dengan perkembangan yang terdapat dalam industri jasa keuangan.<sup>9</sup>

Terdapat penambahan bagi pihak pelapor Informasi Debitur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016, pihak pelapor sebelumnya tidak

---

<sup>6</sup>Pasal 4 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Laporan Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

<sup>7</sup>Pasal 4 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Laporan Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

<sup>8</sup>Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Laporan Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

<sup>9</sup>[www.sikapiuangmu.ojk.go.id](http://www.sikapiuangmu.ojk.go.id), diakses pada tanggal 20 Maret 2018, Pukul 13.00 WIB.

termasuk Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Pembiayaan dengan aset dibawah 10 miliar rupiah serta Lembaga Penyedia Jasa Keuangan yang lain, namun pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017, pelapor menurut Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 adalah Bank Umum, BPR, BPRS, Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan fasilitas penyediaan dana kecuali lembaga keuangan mikro, sehingga dapat diketahui bahwa pada peraturan OJK yang baru tersebut memperluas pihak pelapor.<sup>10</sup>

Peraturan perluasan dari Sistem Informasi Debitur yang bernama Sistem Layanan Informasi Keuangan merupakan upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mencegah terjadinya kredit macet, kedepannya dapat berfungsi dengan efektif bila dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Tetapi dalam praktik nya, terkait pelaporan informasi keuangan debitur, bank yang telah meemberikan fasilitas kredit kepada debitur atau memberikan pembiayaan ketika melaksanakan pelaporan perihal pelunasan debitur melakukan kesalahan atau kelalaian maupun tidak sama sekali melaporkan mengenai pelunasan tersebut. Sehingga terjadi perbedaan laporan riwayat kredit nasabah pada bank yang memberikan kredit dengan sistem informasi debitur yang ada pada Bank Indonesia yang mengakibatkan nasabah masuk dalam kategori kredit macet sehingga didaftar hitamkan atau *blacklist*. Dalam kamus istilah populer perbankan Bank Indonesia, *blacklist* atau daftar hitam adalah daftar nama para nasabah

---

<sup>10</sup>Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Laporan Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan..



individu atau badan hukum maupun perusahaan yang terkena sanksi dari bank karena telah melakukan beberapa tindakan tertentu yang bisa merugikan pihak Bank dan masyarakat.<sup>11</sup>

Pada Sistem Informasi Keuangan, bank satu dengan bank lainnya akan mengetahui informasi dan profil dari nasabah yang hendak mengajukan kredit. Apakah termasuk ke dalam daftar hitam atau tidak. Namun, jika terjadi kesalahan atau kelalaian dari pihak bank ataupun pihak penyedia jasa yang lain dalam pelaporan pelunasan kredit hal ini tentu akan menimbulkan kerugian yang besar bagi nasabah. Misalnya jika nasabah akan melakukan pengajuan kredit kembali kepada bank lainnya, secara prosedur bank dan pihak pelapor lain tersebut telah memberikan laporan nasabah pada Sistem Informasi Keuangan dan melihat apakah termasuk dalam daftar hitam atau riwayat kredit macet maka secara otomatis bank tersebut tidak akan memproses atau menindaklanjuti pengajuan kredit tersebut karena bank menganggap bahwa nasabah tersebut tidak layak untuk menerima fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank karena riwayat kredit debitur tersebut dalam Sistem Informasi Keuangan nya bermasalah.<sup>12</sup>

Kasus mengenai kesalahan Bank dalam menjatuhkan daftar hitam kepada nasabah nya terjadi kepada Sutrisno dengan P.T Bank Mandiri (Persero) Tbk. cabang Kota Solo, Sriwedari. Dalam kasus tersebut, Sutrisno yang merupakan seorang pelaku usaha mikro bertindak selaku penggugat dan P.T Bank Mandiri (Persero) Tbk. cabang Kota Solo, Sriwedari sebagai pihak tergugat. Pihak

---

<sup>11</sup>[www.pressreader.com](http://www.pressreader.com), diakses pada tanggal 20 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB.

<sup>12</sup>Nanci Mamarimbing, "**Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)**", (Jurnal Lex Crimen vol VI/No.3, Mei 2017), hlm. 42.



penggugat melakukan gugatan kepada Pengadilan karena tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa memasukkan penggugat ke dalam daftar hitam Bank Indonesia dengan dalih bahwa penggugat memiliki tunggakan hutang kartu kredit padahal penggugat sama sekali tidak pernah menggunakan fasilitas kartu kredit tersebut yang akibat perbuatan tergugat tersebut membawa kerugian bagi penggugat karena akhirnya penggugat tidak dapat mengajukan kredit sebagai modal usaha nya.

Penggugat melayangkan gugatan kepada Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 22 April 2014 karena sebelumnya sudah melakukan penyelesaian masalah dengan pihak tergugat baik secara lisan maupun tertulis sebanyak 3 kali, namun tidak ada itikad baik dari pihak tergugat untuk menyelesaikan permasalahan. Penggugat telah dirugikan kepentingan secara *materiil* dikarenakan permohonan fasilitas kredit modal usaha telah ditolak oleh lembaga keuangan antara lain PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) UlaMM Wonogiri, PT. Bank Bukopin cabang pembantu 31-Primkopti Wonogiri, PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk cabang Wonogiri. Hal tersebut dikarenakan penggugat telah masuk ke dalam Daftar Hitam (*blacklist*) Oleh Bank Indonesia melalui surat No. 16/570/DPKL/Slo tanggal 26 Maret 2014, dimana dalam lembar informasi debitur menyebutkan penggugat mempunyai tunggakan kartu kredit dari tergugat senilai 8 juta rupiah.

Pada kasus tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta mengeluarkan amar putusan yang antara lain menerangkan bahwa tergugat yaitu Bank Mandiri cabang Kota Solo, Sriwedari telah melakukan perbuatan melawan hukum,

menyatakan bahwa Surat Tagihan (*invoice*) tertanggal 06 Maret 2013 adalah batal demi hukum dan cacat formil, dan menghukum tergugat untuk membayar sejumlah ganti kerugian kepada pihak penggugat sebesar seratus juta rupiah.

Salah satu tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diamanahkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 4 (C) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UUOJK) yang dinyatakan sebagai berikut,<sup>13</sup>

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.”

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan tentunya dibuat dengan tujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Terdapat lima prinsip penting perlindungan konsumen yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Lima prinsip ini harus ditaati agar perlindungan konsumen dapat berjalan dengan efektif. Lima prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Pasal 4 (C) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pertama, transparansi. Transaparansi didalam perbankan mengharuskan seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk memberikan informasi secara terbuka, jelas dan bahasa yang mudah dimengerti kepada konsumen perbankan mengenai seluruh produk perbankan yang dimiliki nya. Hal ini merupakan hal yang penting agar konsumen dapat memahami secara jelas produk yang ditawarkan.<sup>14</sup>

Kedua, perlakuan yang adil. Prinsip ini, menekankan agar Pelaku Usaha Jasa Keuangan bertindak adil dan tidak diskriminatif kepada konsumen dengan memberikan perlakuan yang tidak membedakan antara konsumen perbankan yang satu dengan yang lainnya tanpa membedakan pada suku, agama dan ras.<sup>15</sup>

Ketiga, keandalan. Pengertian keandalan yang dimaksud dalam prinsip ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastuktur, dan sumber daya manusia yang andal.

Keempat, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen. Prinsip yang keempat ini mengatur agar Pelaku Usaha Jasa Keuangan menjaga segala rahasia dan keamanan data milik konsumen perbankan. Pelaku Usaha Jasa Keuangan hanya dibolehkan menggunakan data dan informasi sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang telah berdasarkan persetujuan oleh konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Modul Workshop Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, 2015, hlm. 61.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Penjelasan Pasal 2 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Kelima, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Prinsip ini terkait dengan pelayanan/penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh konsumen dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Pelayanan pengaduan konsumen ini difasilitasi oleh OJK untuk mempermudah pengaduan yang diajukan oleh konsumen perbankan. Pihak perbankan juga menawarkan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian alternatif yang efektif. Jika suatu ketika terjadi sengketa antara pihak bank dan konsumen. Hal tersebut bertujuan agar sengketa dapat diselesaikan secara cepat.<sup>17</sup>

Agar perlindungan konsumen dalam sektor keuangan dapat berjalan dengan maksimal, maka kelima prinsip mengenai perlindungan konsumen tersebut diatas tentunya harus dipahami dan diaplikasikan baik oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan maupun konsumen perbankan itu sendiri. Prinsip ini memberi petunjuk umum yang kemudian dijabarkan secara eksplisit dalam pasal-pasal yang ada.

POJK Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Undang-Undang Perbankan yang mengatur mengenai Perlindungan terhadap debitur dapat memberikan pandangan terhadap para debitur bahwa segala hak-hak perbankan debitur diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Sehingga, bila suatu hari terjadi sengketa diantara debitur dan Bank maka tidak akan ragu dan takut untuk melaporkan kerugian yang di alami oleh debitur dan menuntut pertanggung

---

<sup>17</sup> Modul Workshop Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, 2015, hlm.70

jawaban hukum terhadap pihak bank atau Lembaga keuangan lain yang menyediakan fasilitas penyediaan dana yang terkait.<sup>18</sup>

Sama halnya dengan debitur yang di daftar hitamkan atau *blacklist* yang diakibatkan oleh kesalahan dan kelalaian pihak bank mengenai pelaporan informasi nasabah debitur maupun pelunasan debitur dalam Sistem Informasi Keuangan yang mengakibatkan debitur tidak bisa mendapatkan pelayanan jasa perbankan di bidang kredit atau pembiayaan. Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ada sebagai suatu instrumen dan menjadi pedoman bagi debitur dalam melindungi setiap kepentingannya dan menuntut pihak bank dan lembaga penyedia jasa keuangan lain untuk bertanggung jawab atas kesalahan dan kelalaiannya yang merugikan debitur.

Konsep ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk kepada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam penerapan konsepsi perbuatan melawan hukum seringkali dipersamakan dengan konsepsi perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi* padahal keduanya merupakan konsepsi yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian *immateriil* diserahkan kepada hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*. Hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian *immateriil* yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas hakim yang memutus perkara.

---

<sup>18</sup>Pedoman penyusunan laporan debitur melalui sistem layanan informasi keuangan versi 6-16 Januari 2017, hlm. 45.

Beranjak dari uraian latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam untuk mengkaji isu hukum tersebut dalam skripsi dengan judul

**“TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK TERHADAP NASABAH YANG TERKENA DAFTAR HITAM AKIBAT KESALAHAN BANK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015)”**



Tabel 1.1

Tabel Orisinalitas Penelitian

Tahun	Nama Peneliti & Asal Instansi	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan (Perbedaan)
2015	Adyt Dimas Prasaja Utama	Perlindungan hukum terhadap nasabah akibat perbuatan melawan hukum oleh bank berdasarkan undang- undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi pada bank	Bagaimanakah pelaksanaan pertanggung jawaban bank terhadap nasabah yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum oleh bank?	1. Penelitian Terdahulu mengkaji mengenai pelaksanaan pertanggungjawab an bank terhadap nasabah yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum oleh bank 2. Penelitian Terdahulu tidak secara khusus mengkaji tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah yang terkena daftar hitam akibat

		pembangunan daerah Bali)		kesalahan bank
--	--	--------------------------	--	----------------





2015	Apresya Handayani Sembiring,Univers itas Sumatera Utara	Tanggung Jawab Hukum Bank Dalam Menyelesaika n Kredit Macet di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kabanjahe	Bagaimanakah pertanggung jawaban korporasi bank dalam menyelesaikan kredit macet?	1. Penelitian Terdahulu meneliti tentang pertanggung jawaban korporasi bank dalam menyelaskan kredit macet 2. Penelitian Terdahulu tidak secara khusus meneliti tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah yang terkena daftar hitam akibat kesalahan bank
------	---	---	--	--

2012	Putri Juliannis, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	Tanggung jawab pihak bank atas kesalahan sistem komputerisasi kartu ATM pada Bank Mandiri ditinjau dari ketentuan perlindungan nasabah	1. Bagaimanakah tanggung jawab pihak bank atas kesalahan sistem komputerisasi kartu ATM ditinjau dari ketentuan perlindungan nasabah?	1. Penelitian Terdahulu meneliti tentang tanggung jawab pihak bank atas kesalahan sistem komputerisasi kartu ATM ditinjau dari ketentuan perlindungan nasabah 2. Penelitian Terdahulu tidak secara khusus meneliti tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah yang terkena daftar hitam akibat kesalahan bank
------	--	--	--	--

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah putusan hakim Mahkamah Agung nomor 1527 K/Pdt/2015 telah sesuai dengan kitab undang-undang hukum perdata terkait dengan ganti rugi yang disebabkan akibat perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum bank bagi nasabah yang terkena daftar hitam akibat kesalahan bank?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis putusan hakim Mahkamah Agung nomor 1527 K/Pdt/2015 apakah telah sesuai dengan kitab undang-undang hukum perdata terkait dengan ganti rugi yang disebabkan akibat perbuatan melawan hukum
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis tanggung jawab hukum bank bagi nasabah yang terkena daftar hitam akibat kesalahan bank

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian menjelaskan tentang kegunaan hasil penelitian bagi beberapa pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, pada pembahasan permasalahan dalam kegiatan penelitian ini diharapkan nantinya dapat

memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang dapat diterapkan bagi seluruh kalangan masyarakat yang dijabarkan sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian atas masalah-masalah yang akan dibahas dapat menjadikan pemahaman dan pandangan baru mengenai tanggung jawab hukum bank bagi nasabah yang terkena daftar hitam akibat kesalahan bank, mengingat saat ini masih terjadi kekosongan hukum terhadap masalah tanggung jawab hukum bank bagi nasabah yang terkena daftar hitam akibat kesalahan bank. Dengan demikian diharapkan penelitian ini akan dapat memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab hukum bank bagi nasabah yang terkena daftar hitam akibat kesalahan bank. Diharapkan juga dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan perkembangan dalam hukum perdata bisnis di Indonesia.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Perbankan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Perbankan dan Lembaga penyedia Jasa Keuangan lainnya agar lebih berhati-hati dan mempertanggung jawabkan pelaporan informasi keuangan debitur kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal menegakkan peraturan perundang-undangan

yagn berkaitan dengan tanggung jawab hukum bank bagi nasabah yang terkena daftar hitam akibat kesalahan bank.

c. Bagi Bank Indonesia

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Bank Indonesia yang saling bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan agar lebih berhati-hati dan mempertanggung jawabkan pelaporan informasi keuangan debitur.

d. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam menentukan kebijakan selanjutnya dalam hal merumuskan dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengn tanggung jawab hukum bank bagi nasabah yang terkena daftar hitam akibat kesalahan bank.

d. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan infromasi kepada para nasabah terkait dengan tanggung jawab hukum bank bagi nasabah yang terkena daftar hitam akibat kesalahan bank, sehingga kedepannya nasabah tidak akan dirugikan karena permasalahan terkait pelaporan sistem informasi keuangan.

## **E. Sistematika Penulisan**

BAB 1 :

### **PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II :

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka berisi tentang teori-teori yang melandasi penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok bahasan terkait dengan tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah yang terkena daftar hitam akibat kesalahan bank.

BAB III :

### **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, definisi konseptual, dan sistematika penulisan tentang tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah yang terkena daftar hitam akibat kesalahan bank.

#### BAB IV :

##### PEMBAHASAN

Pada bab ini, data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka teoritik yang dituangkan dalam BAB II sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan yaitu tentang tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah yang terkena daftar hitam akibat kesalahan bank.

#### BAB V :

##### PENUTUP

Pada bab ini, berisi kesimpulan dan saran dari semua yang telah dicapai pada masing-masing bab sebelumnya yang membahas tentang perlindungan hukum bagi debitur yang terkena daftar hitam akibat kesalahan bank.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Bank

##### 1. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata italia *banco* yang artinya bangku.<sup>19</sup> Bangku inilah istilah yang kemudian dipergunakan oleh bankir untuk melakukan pelayanan kegiatan operasionalnya kepada para konsumen perbankan.<sup>20</sup> Istilah bangku akhirnya berlaku secara resmi dan kemudian populer menjadi bank. Bank termasuk ke dalam salah satu lembaga penyedia jasa keuangan yang berperan sebagai tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana-dana yang dimilikinya.<sup>21</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>22</sup>

Menurut ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

---

<sup>19</sup>Fransisca Claudya Mewoh, dkk. “Analisis Kredit Macet”, (Jurnal Administrasi Bisnis, Jakarta, 2012), hlm.2.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, (Jakarta:Kencana.2007), hlm.5

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm 7-8.



kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>23</sup> Kemudian, agar masyarakat mempercayakan bank dan agar mereka mau menyimpan dana yang mereka miliki di Bank, maka pihak perbankan memberikan ransangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.<sup>24</sup> Balas jasa yang diberikan oleh bank tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa yang lainnya.<sup>25</sup> Setelah pihak perbankan memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga beserta biaya administrasi yang besarnya mengacu kepada besarnya bunga simpanan.<sup>26</sup>

Menurut G.M.Verryn Stuart, bank merupakan suatu badan yang memiliki tujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, apakah itu dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan sejumlah dana yang diperolehnya dari orang lain, maupun melalui cara mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.<sup>27</sup> Kasmir mengartikan bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan dana tersebut nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat serta memberikan

---

<sup>23</sup>Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>24</sup>Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.25.

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>Rifka Regar, dkk, “Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah (Studi Pada PT.Bank Sulutgo cabang Manado)”, (Jurnal Administrasi Bisnis, 2016), hlm.2.

<sup>27</sup>Alfitra, **Modus Operandi Pidana Khusus di luar KUHP (Korupsi, Money Laundering & Trafficking**, (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2014), hlm. 43.

jasa bank lainnya.<sup>28</sup> Kemudian menurut A. Abdurrachman, bank termasuk kedalam lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, yang melakukan kegiatan seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, melakukan pengawasan terhadap mata uang, berlaku sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain sebagainya.<sup>29</sup>

## 2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank

Pasal 2 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa:

“perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.<sup>30</sup>

Kemudian yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi dalam pasal tersebut adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>31</sup> Demokrasi ekonomi dalam pasal tersebut tersimpul dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.<sup>32</sup> Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>33</sup> Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada di

---

<sup>28</sup>Kasmir, **Analisis Laporan Keuangan**, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.11.

<sup>29</sup>A.Abdurrachman, **Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan**, (Jakarta:Pradnya Paramita, 2003), hlm.80.

<sup>30</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>31</sup>Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>32</sup>Elli Ruslina, **“Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”**, (Jurnal konstitusi volume 9, nomor 1, Maret 2012), hlm. 52.

<sup>33</sup>Gadug Kurniawan, **“Kebebasan Sebagai Hakikat Demokrasi”**, (Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor 1, Januari 2015), hlm. 97.

tangan rakyat.<sup>34</sup> Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat.

Perbankan Indonesia memiliki fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki fungsi dan misi sebagai agen pembangunan (*agent of development*).<sup>35</sup> Kasmir dalam bukunya *Dasar-Dasar Perbankan* mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.<sup>36</sup>

Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>37</sup> Perbankan Indonesia tidak semata-mata hanya berorientasi ekonomis atau hanya mencari keuntungan semata, namun juga memiliki tujuan yang strategis yaitu berusaha melakukan upaya terhadap hal-

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 98.

<sup>35</sup>Sumadi, "Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah", (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Nomor 3, 2017), hlm.2.

<sup>36</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.4.

<sup>37</sup>Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

hal yang menyangkut stabilitas nasional antara lain mencakup stabilitas politik dan stabilitas sosial.<sup>38</sup>

### 3. Nasabah Bank

#### a. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Sedangkan pelayanan jasa yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank adalah menyangkut penghimpunan dana dan pemberian fasilitas kredit. Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Perbankan kemudian digunakan sebagai acuan rumusan nasabah yang mana nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.<sup>39</sup>

Rumusan tersebut kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Nasabah Penyimpan merupakan nasabah yang melakukan penempatan dana di bank kedalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>40</sup>
- b. Nasabah Debitur merupakan nasabah yang oleh bank diberikan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang

---

<sup>38</sup>Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, (Jakarta:Kencana, Cetakan Ke 6, 2011), hlm. 20.

<sup>39</sup>Fatmah Paparang, “Kegiatan Bank dalam penghimpunan dana masyarakat”, (Jurnal Ilmu Hukum Vol III No.9, 2016), hlm. 11.

<sup>40</sup>Beny Rahman, “Pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah yang terkait dengan fasilitas transaksi melalui sms banking”, (Jakarta:Publikasi Ilmiah) hlm.10.

dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian diantara bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Di dalam praktik nya, dikenal 3 (tiga) macam nasabah antara lain:

- a. Nasabah Deposan, yaitu nasabah yang melakukan penyimpanan dana di suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan;<sup>42</sup>
- b. Nasabah yang memetik manfaat atas fasilitas kredit perbankan, misalnya dalam bentuk kredit kepemilikan atas rumah, kredit usaha kecil dan lain sebagainya;
- c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain dan pihak bank berperan sebagai perantara transaksi. Misalnya, transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri. Khusus untuk transaksi dengan model yang seperti ini, biasanya importir membuka *letter of credit* (L/C) pada suatu bank demi terciptanya kelancaran dan keamanan dalam pembayaran

#### b. Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah yaitu termasuk ke dalam hubungan antara subjek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban. Mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban antara subjek hukum bank dan nasabah nya tersebut akan diuraikan berikut ini.

---

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>David Y. Wonok, "Perlindungan hukum atas hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa bank terhadap risiko yang timbul dalam penyimpanan dana", (Jurnal Ilmu Hukum Vol.1/No.2/April-Juni/Edisi Khusus, 2013), hlm. 60.

Kewajiban dari bank, antara lain: <sup>43</sup>

- a. Bank memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia keuangan nasabah;
- b. Bank berkewajiban untuk mengamankan dana nasabah;
- c. Bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah;
- d. Bank berkewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat;
- e. Bank berkewajiban untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabahnya.

Sedangkan hak dari bank antara lain: <sup>44</sup>

- a. Bank memiliki hak untuk mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang telah mereka berikan kepada nasabah;
- b. Bank memiliki hak untuk menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama;
- c. Bank memiliki hak untuk melelang agunan apabila nasabah tidak mampu melunasi kredit yang telah disepakati melalui akad kredit dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- d. Bank berhak untuk melakukan pemutusan rekening nasabah (klausula ini cukup banyak ditemui dalam praktiknya);

---

<sup>43</sup> Hilman Hadi Kusuma, **Bahasa Hukum Indonesia**, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 33.

<sup>44</sup> Mauritz Pray Takasenseran, **"Perjanjian antara Bank dan Nasabah menurut undang-undang No.10 Tahun 1998"**, (Jurnal Lex et societatis vol. IV/No 7/Juli, 2016), hlm. 47.

- e. Bank berhak untuk memperoleh buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit ketika terjadi suatu keadaan yang terpaksa harus dilakukan penutupan rekening.

Sedangkan kewajiban dari nasabah, antara lain:<sup>45</sup>

- a. Nasabah berkewajiban untuk menilai kewajaran terhadap terkait suku bunga produk tabungan dan deposito, yang terkait dengan tingkat suku bunga yang secara umum berlaku di pasaran;
- b. Nasabah wajib menilai kemampuan bank yang bersangkutan dalam mencetak laba selama 2 tahun berturut-turut setelah terkena pajak;
- c. Nasabah wajib untuk memperhatikan ekspansi kredit yang dilakukan bank yang bersangkutan sesuai dengan *Net Interest Margin*;
- d. Nasabah berkewajiban untuk memperhatikan *Loan Deposit Ratio* (suatu perbandingan antara pinjaman yang diberikan oleh bank sebelum dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu yang diperoleh dari sumber dana pihak ketiga);
- e. Nasabah memiliki kewajiban untuk mengecek apakah dana pihak ketiga yang ditempatkan oleh bank yang bersangkutan, ditempatkan dalam aktiva produktif ataukah tidak;
- f. Nasabah berkewajiban untuk memperhatikan rasio antara modal bank tersebut dengan aset bank yang bersangkutan.

---

<sup>45</sup> Sentosa Sembiring, **Hukum Perbankan**, edisi Revisi, (Bandung:Mandar Maju, 2012), hlm. 46.



Sedangkan hak dari nasabah, antara lain yaitu sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Nasabah memiliki hak untuk mengetahui secara terperinci dan jelas mengenai produk-produk perbankan yang ditawarkan kepadanya;
- b. Nasabah memiliki hak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu diantara pihak nya dan pihak bank bersangkutan.

Sesuai dengan uraian mengenai hak dan kewajiban dari bank tersebut diatas, maka kemudian dapat dilihat adanya hubungan antara masing-masing subjek hukum tersebut. Hubungan antara bank dan nasabah terdiri dari dua bentuk, yaitu sebagai berikut:<sup>47</sup>

a. Hubungan Kontraktual

Hubungan antara bank dan nasabah secara tradisonal dipandang sebagai hubungan kontraktual yang diatur oleh hukum perjanjian dan hubungan diantara keduanya merupakan hubungan kreditur dan debitur.<sup>48</sup> Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik itu nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non-debitur non-deposan. Terhadap nasabah debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank

---

<sup>46</sup>Aprilya Altji Papendang, **"Hak dan kewajiban nasabah bank serta perlindungan hukum menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998"**, (Jurnal Lex Administratum Vol 4 No.3, 2016), hlm. 30.

<sup>47</sup>MunirFuady, **Hukum Perbankan Modern**, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.102.

<sup>48</sup>Noor Hafidah, **"Sekilas tentang risiko dan penyelesaian hukum terhadap kredit macet"**, (Jurnal Hukum No.19, Vol 9 Februari, 2002), hlm 82.

sebagai kreditur sebagai pihak pemberi dana dengan pihak debitur atau pihak yang meminjam dana.

Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur tersebut bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kontrak (buku ketiga). Sebab, menurut isi dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa, semua perjanjian yang disebut secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.<sup>49</sup> Selain dari ketentuan umum mengenai kontrak yang berlaku untuk semua jenis kontrak, namun sebagian sarjana berpendapat bahwa perjanjian kredit bank diatur juga oleh ketentuan khusus mengenai pinjam pakai habis atau dinamakan juga dengan *verbruiklening* (vide Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata).<sup>50</sup>

Berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk nasabah deposan ataupun nasabah non debitur-non deposan, tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai kontrak jenis ini dalam KUHPerdata. Kontrak-kontrak yang menyangkut nasabah deposan ataupun nasabah non debitur-non deposan kemudian hanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum yang berasal dari KUHPerdata mengenai kontrak.<sup>51</sup> Berbeda dengan kontrak untuk nasabah debitur, *incasu* kontrak kredit yang seringkali diatur cukup komprehensif, maka untuk

---

<sup>49</sup>Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>50</sup>Sarah D.L.Roeroe, **“Aspek hukum penggunaan surat berharga pada dunia perbankan bagi masyarakat Indonesia”**, (Jurnal Hukum Unsrat Vol.22/No.7/Agustus, 2016), hlm.12.

<sup>51</sup>Mohammad Wisno Hamin, **“Perlindungan hukum bagi nasabah (debitur) bank sebagai konsumen pengguna jasa bank terhadap risiko dalam perjanjian kredit bank”**, (Jurnal Hukum Lex Crimen vol. VI/No.1/Jan-Feb, 2017), hlm. 49.

kontrak antara bank dengan nasabah deposan atau nasabah non deposan-nondebitur, secara lazim hanya diatur dalam bentuk kontrak yang sangat sederhana. Itupun, kaidah nya sama seperti untuk kontrak kredit, yang kontrak nya diberlakukan dalam bentuk kontrak standar (kontrak baku), dan sebagian besar terjadi dalam praktik terdapat ketentuan-ketentuan yang berat sebelah di dalamnya, dimana pihak bank seringkali lebih diuntungkan. Atau dengan kata lain, pihak bank akan bertindak sebagai pihak *superior* dalam kontrak standar baku tersebut dan pihak nasabah akan bertindak sebagai pihak *inferior* dalam kontrak standar baku tersebut.

Hubungan yang terjadi diantara nasabah penyimpan dana dengan bank merupakan hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditur-debitur, di mana pihak bank berfungsi sebagai debitur sedangkan pihak nasabah berfungsi sebagai kreditur, namun tetap prinsip hubungan seperti ini juga kemudian tidak dapat diberlakukan secara mutlak.

#### b. Hubungan Non Kontraktual

Karena dengan semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan, maka dalam hubungan antara bank dengan nasabah juga berkembang kedalam bentuk-bentuk hubungan lainnya yang dalam transaksi-transaksi tertentu hubungan tersebut banyak diterapkan. Antara lain yaitu sebagai berikut.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Tri Widiyono, **Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, simpanan, jasa dan Kredit**, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 52.

a. Hubungan Kepercayaan (*Fiduciary Relation*)

Hubungan kepercayaan terjadi karena bank di dalam masyarakat memiliki status nya yang unik. Hal tersebut yaitu bank berperan sebagai tempat khusus yang aman dan dipercaya oleh masyarakat.<sup>53</sup> Nasabah perbankan hanya bersedia menyimpan dana pada suatu bank apabila nasabah tersebut memiliki kepercayaan kepada bank yang bersangkutan dan bank mampu membayar kembali dana yang telah dipercayakan padanya itu apabila ditagih.<sup>54</sup>

b. Hubungan Kerahasiaan (*Confidential Relationship*)

Hubungan antara bank dan nasabah yang didalamnya diliputi oleh kerahasiaan merupakan suatu hal yang lazim dan akan selalu ada di dalam praktek perbankan.<sup>55</sup> Hubungan kerahasiaan ini sangat diperlukan dan menjadi kepentingan milik bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Di samping itu, sebenarnya hal tersebut dilakukan untuk

---

<sup>53</sup>Titik Triwulan Tutik, **Hukum Perdata dalam sistem hukum nasional**, (Jakarta:Kencana, 2015), hlm. 366.

<sup>54</sup> Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy on Funding and Liability Management*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 82.

<sup>55</sup>John Bert Christian, dkk, "Analisis hukum atas penerapan rahasia bank di Indonesia terkait dengan perlindungan data nasabah berdasarkan prinsip kepercayaan kepada bank (studi pada bank cimb niaga tbk. cabang Medan)", (USU Law Journal, Vol 4 No.4, 2016), hlm. 137.

menghindari terjadinya penarikan dana secara besar-besaran dan tiba-tiba oleh nasabah (*rush*) yang dapat membahayakan kehidupan bank.<sup>56</sup>

c. Hubungan Kehati-hatian (*Prudential Banking*)

Undang-Undang Perbankan berisi penegasan bahwasanya sekalipun uang yang disimpan oleh nasabah telah menjadi milik bank sejak disetorkan dan selama dalam penyimpanan bank, namun bank tidak memiliki kebebasan mutlak untuk menggunakan uang milik nasabah tersebut.<sup>57</sup> Bank hanya diperbolehkan untuk menggunakan uang nasabah tersebut untuk tujuan dan dengan cara yang dapat menjamin kepastian bahwa bank yang bersangkutan nantinya akan mampu membayar kembali dana nasabah yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh nasabah yang bersangkutan.<sup>58</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Bank

### 1. Pengertian tanggung jawab

Kata tanggung jawab dalam bahasa inggris digunakan dalam beberapa kata, yaitu *liability*, *responsibility*, dan *accountability*.<sup>59</sup> Kamus Bahasa Inggris-Indonesia mengartikan *liability* adalah pertanggung jawaban, sedangkan *responsibility* adalah pertanggungan jawab atau tanggung jawab, dan *accountability* adalah keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan dapat

---

<sup>56</sup>*Ibid*, hlm. 138.

<sup>57</sup>Soetanto Hadinoto, **Bank Strategy of Funding and Liability Management**, (Jakarta:Gramedia, 2008), hlm. 84.

<sup>58</sup>*Ibid*.

<sup>59</sup> Wahyu Sasongko, **Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen**, (Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2007), hlm.95.

dimintai pertanggung jawab.<sup>60</sup>Tanggung jawab dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Arti tanggung jawab secara absah adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya.<sup>61</sup>Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab sebagai wujud dilakukannya perbuatan dengan kesadaran akan kewajiban.Dalam hukum setiap tuntutan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, apa yang menyebabkan seseorang itu harus bertanggung jawab. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu yang tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.<sup>62</sup>Dasar pertanggung jawaban di dalam hukum perdata adalah kesalahan dan resiko yang ada pada setiap peristiwa hukum.Pertanggung jawaban secara teoritis dikaitkan dengan hubungan hukum yang timbul diantara pihak yang menuntut pertanggung jawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab.

## 2. Jenis tanggung Jawab

Berdasarkan jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum, pertanggung jawaban dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

---

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm.128.

<sup>61</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, edisi kedua, cet 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1006.

<sup>62</sup>Julista Mustamu, “**Pertanggung jawaban hukum pemerintah (kajian tentang ruang lingkup dan hubungan diskresi)**”, (Jurnal Sasi vol.20 No.2 bulan Juli-Desember, 2014), hlm. 8

- a. Pertanggung jawaban atas dasar kesalahan, yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, tindakan kurang hati-hati;
- b. Pertanggung jawaban atas dasar resiko, yaitu suatu pertanggung jawaban yang harus dipikul sebagai resiko yang harus diambil oleh seorang pengusaha atas kegiatan usahanya.

Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam konteks pertanggung jawaban pelaku usaha diatur beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut :<sup>63</sup>

a. Pertanggung jawaban Pidana Korporasi

Subjek hukum dari tindak pidana perlindungan konsumen yaitu pelaku usaha itu sendiri. Pelaku usaha yang dimaksud dalam pengertian tersebut merupakan perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, imptir, pedagang, distributor, dan lain- lain.Artinya, bank pemerintah maupun swasta termasuk Bank Perkreditan juga termasuk kategori ini.

b.Hak gugat Lembaga Konsumen

Lembaga konsumen tentu nya atas nama kepentingan konsumen dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dapat dilakukan pelaku usaha yang merugikan kepentingan konsumen (Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK).Lembaga Konsumen mempunyai hak gugat (*legal standing to sue*) kepada pelaku usaha,

---

<sup>63</sup> Joice Irma Runtu Thomas, “Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah yang dirugikan dalam pembobolan rekening nasabah”, (Jurnal Hukum Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013), hlm. 63.



terlepas dari atau tidak adanya surat kuasa yang diberikan oleh konsumen yang merasa dirugikan.

#### c. Gugatan Kepentingan Kelompok

Gugatan kepentingan kelompok dapat dilakukan terhadap sengketa konsumen yang melibatkan konsumen dalam jumlah besar. Padahal sebenarnya persoalan ini menyangkut hal yang sama, konsumen dapat mengajukan gugatan kepentingan kelompok (*class action*) kepada pelaku usaha (Pasal 46 ayat (1) huruf b UUPK).

#### d. Beban Pembuktian terbalik

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.<sup>64</sup>

#### c. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip-prinsip tanggung jawab secara umum dalam hukum dibedakan sebagai berikut :<sup>65</sup>

##### a. Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan merupakan prinsip yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam *Burgelijk Wetboek* atau KUHP, khususnya didalam Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh.<sup>66</sup> Prinsip ini menyatakan bahwa, “seseorang dapat dimintakan

---

<sup>64</sup> Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

<sup>65</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, **Hukum Perlindungan Konsumen**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.92.

<sup>66</sup> Shindarta, **Hukum Perlindungan Konsumen**, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm.59-61.

pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang telah dilakukannya.”

b. Praduga selalu bertanggung jawab

Prinsip praduga selalu bertanggung jawab ini menyatakan, tergugat akan selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), hingga tergugat dapat membuktikan dirinya tidak bersalah. Jadi beban pembuktian terletak pada si tergugat.<sup>67</sup>

c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab

Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip yang kedua. Dalam ruang lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas hanya dikenal prinsip praduga selalu tidak bertanggung jawab, dan dikarenakan adanya pembatasan yang demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

d. Tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strictliability*) merupakan prinsip tanggung jawab dimana kesalahan ditetapkan bukan sebagai faktor yang menentukan untuk kemudian harus dilakukan nya pertanggung jawaban, namun terdapat beragam pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab<sup>68</sup>.

---

<sup>67</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm.95.

<sup>68</sup> Sukarmi, **Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha**, (Jakarta:Pustaka Sutra, 2004), hlm. 41.

e. Pembatasan tanggung jawab

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ini sering digunakan oleh pelaku usaha sebagai klausula eksonerasi dalam *standart contract* yang dibuat olehnya. Prinsip ini apabila dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha maka akan sangat merugikan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, para pelaku usaha seharusnya tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang dapat merugikan konsumen, termasuk dalam membatasi tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak maka hal tersebut haruslah berdasarkan kepada undang-undang yang jelas.<sup>69</sup>

d. Tanggung Jawab Bank

Nasabah merupakan kreditur yang memiliki hak preferen. Hak preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditur untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain. Artinya bahwa nasabah harus didahulukan dalam penerimaan pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa, “bank harus memberikan informasi kemungkinan timbulnya risiko kerugian transaksi nasabah nya dalam kegiatan usaha bank tersebut”.<sup>70</sup> Selain itu dalam Pasal 37B

---

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm. 62.

<sup>70</sup>Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa, “setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank tersebut.”<sup>71</sup>

Sesuai ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, nasabah memiliki hak untuk memperoleh provisi atau ganti kerugian atas kesalahan yang dilakukan oleh Bank. Bank harus tetap melakukan tanggung jawab karena Bank merupakan pihak yang memiliki kewenangan penuh mengawasi para pegawainya. Bank wajib bertanggung jawab yaitu dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang di derita oleh para nasabahnya. Hal ini tentunya berpedoman dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Yurisprudensi 558K/Sip/1971 Tanggal 4 Juni 1973, Bank berkewajiban mengganti kerugian yang timbul karena kesalahan pegawainya.

Tanggung jawab bank terhadap nasabah juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/6/PBI/2005 Tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah; PBI Nomor 7/7/PBI/2005 Tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah; dan PBI Nomor 8/5/PBI/2006 Tanggal 30 Januari 2006 tentang Mediasi Perbankan.<sup>72</sup>

Masalah pertanggung jawaban perdata atas kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh bank dapat dihubungkan dengan kepengurusan bank tersebut. Pengurus bank adalah pihak yang bertindak mewakili badan hukum bank tersebut

---

<sup>71</sup>Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>72</sup>Komang Juniawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan kartu ATM Pada Bank Swasta Nasional di Denpasar”, (Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 3 Nomor 2, 2013), hlm. 52.

berdasarkan ketentuan anggaran dasar perusahaan yang telah mereka susun. Dengan demikian tanggung jawab pengurus terhadap perbuatannya menjadi dua bentuk, yakni tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab perusahaan. Tanggung Jawab pribadi apabila pengurus bertindak di luar kewenangan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan sewaktu pemberian kuasa perwakilan tersebut. Tetapi apabila perbuatan pengurus masih dalam pelaksanaan dan wewenang yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan maka hal tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan.<sup>73</sup>

Sementara di dalam POJK Nomor 1/POJK 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengenai pertanggung jawaban pelaku jasa keuangan diatur dalam Pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut :

“pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan

Dari rumusan pasal tersebut, POJK Nomor 1/POJK 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan hanya menjelaskan mengenai kewajiban bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk melakukan pertanggung jawaban atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.

Sedangkan, POJK Nomor 1/POJK 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tidak mengatur secara rinci mengenai

---

<sup>73</sup> Mahesa Jati Kusuma, **Hukum Perlindungan Nasabah Bank**, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm.125.

mekanisme ganti kerugian bagi konsumen pengguna jasa keuangan, khususnya terhadap konsumen yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya. Sehingga bagi penjatuhan ganti kerugian mengacu kepada peraturan yang tingkatnya lebih tinggi, yaitu berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal yang mengatur mengenai ganti kerugian.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Layanan Informasi Keuangan**

#### **1. Pengertian Sistem Layanan Informasi Keuangan**

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) merupakan sebuah sistem informasi yang dikelola oleh OJK sebagai otoritas yang memiliki kewenangan terhadap informasi keuangan debitur menggantikan Bank Indonesia untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan memberikan layanan informasi kepada para pihak yang memiliki kepentingan di sektor jasa keuangan. Salah satu layanan informasi yang akan diberikan oleh OJK melalui SLIK adalah layanan informasi debitur. Informasi debitur adalah informasi mengenai debitur, fasilitas penyediaan dana yang diterima oleh debitur, serta informasi lain yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor melalui aplikasi SLIK yang terdiri dari antara lain:<sup>74</sup>

#### **1. Laporan Debitur**

- a. Debitur;
- b. Fasilitas Penyediaan Dana;

---

<sup>74</sup>Pedoman Penyusunan Laporan Debitur V6. 1-20170119, hlm.3.

- c. Agunan;
- d. Penjamin;
- e. Pengurus dan Pemilik; dan
- f. Keuangan Debitur

## 2. Pencarian data Informasi Debitur

Aplikasi SLIK terdiri atas 2 (dua) modul utama yaitu modul aplikasi SLIK *Client* dan modul aplikasi *Web* SLIK. Aplikasi SLIK *Client* adalah aplikasi yang di *install* di perangkat komputer Pelapor. Fungsi Aplikasi SLIK *Client* antara lain untuk validasi data, enkripsi, kompresi, dan pembentukan *file* laporan yang siap dikirim ke server SLIK. Selain itu pada aplikasi SLIK *Client* juga terdapat fungsi untuk pengiriman laporan debitur langsung ke server SLIK melalui *File Transfer Protocol* (FTP).<sup>75</sup>

Aplikasi *Web* SLIK dapat diakses oleh Pelapor menggunakan *Web Browser* melalui internet atau ekstranet OJK. Aplikasi *Web* SLIK memiliki fungsi antara lain untuk mengunggah (upload) file laporan debitur sebagai alternatif pengiriman laporan, pemantauan laporan, permintaan informasi debitur, pemantauan permintaan informasi debitur, koreksi data secara *daring* (online), pengelolaan pengguna, dan pemantauan aktivitas pengguna. Selain itu, untuk menampilkan hasil permintaan informasi debitur diperlukan aplikasi *iDeb Viewer* yang harus di *install* di komputer Pelapor.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup>*Ibid.*

<sup>76</sup>*Ibid*, hlm.4.



Dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan yang pada saat ini pengelolaannya dipegang oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut, adanya perluasan cakupan bagi informasi debitur, yaitu melingkupi lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan (*finance*) dan juga ke lembaga keuangan non-bank yang memiliki akses data debitur dan kewajiban melaporkan data debitur ke Sistem Informasi Debitur (SID). Selain itu, SLIK juga digunakan untuk melaporkan, fasilitas penyediaan dana, data agunan, dan data terkait lain yang diperoleh dari berbagai jenis lembaga keuangan yang ada, masyarakat, Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan (LPIP) dan pihak lainnya.<sup>77</sup>

Dengan terintegrasinya SLIK, maka diharapkan agar masyarakat pengguna layanan jasa keuangan menjadi lebih mudah dalam proses pengajuan pinjaman. Selain itu, SLIK juga diharapkan akan mampu untuk meminimalisir angka kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL).

Sedangkan hal-hal yang wajib diketahui dan dipersiapkan oleh masyarakat yang berkeinginan untuk menggunakan Layanan SLIK yaitu antara lain:<sup>78</sup>

a. Gratis

Individu ataupun badan usaha yang mempergunakan layanan SLIK tidak dikenai pungutan biaya apapun. Sehingga, dengan begitu diharapkan kedepannya masyarakat akan lebih berhati-hati dan lebih waspada terhadap para oknum yang melakukan pemungutan dana ataupun meminta dana.

---

<sup>77</sup>[www.sikapiuangmu.ojk.go.id](http://www.sikapiuangmu.ojk.go.id), diakses pada tanggal 19 Maret 2018 Pukul 12.00 WIB.

<sup>78</sup>[www.sikapiuangmu.ojk.go.id](http://www.sikapiuangmu.ojk.go.id), diakses pada tanggal 19 Maret 2018 Pukul 12.00 WIB.

b. Cepat

Keseluruhan proses layanan SLIK hanya membutuhkan waktu 15 menit (5 menit waktu yang dibutuhkan untuk mencetak dan 15 menit merupakan waktu yang digunakan untuk pencetakan dengan penjelasan informasi debitur (iDeb).

c. Sebaiknya tidak diwakilkan

Dalam melakukan permintaan informasi melalui layanan SLIK sebaiknya tidak diwakilkan dengan tujuan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah terkait. Namun, apabila kemudian nasabah tidak dapat mengambil sendiri datanya maka dapat diwakilkan dengan membuat Surat Kuasa yang telah dilengkapi dengan materai 6000, lalu identitas diri yaitu KTP asli milik debitur dan KTP asli penerima kuasa.

d. Mempersiapkan Kartu Identitas Asal

Dalam melakukan permintaan informasi melalui layanan SLIK, dipersiapkan identitas diri yaitu KTP bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau Paspor bagi Warga Negara Asing (WNA) untuk debitur perseorangan. Sedangkan khusus bagi debitur Badan Usaha diwajibkan untuk membawa fotokopi identitas badan usaha dan identitas pengurus dengan menunjukkan identitas asli badan usaha.

## 2. Manfaat Sistem Layanan Informasi Keuangan

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh lembaga keuangan harus memperhitungkan dengan cermat langkah-langkah investasi yang diambil, termasuk dalam penyaluran kredit. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang dianalisa oleh lembaga keuangan sebelum menyetujui permohonan kredit, diantaranya prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar. Semua informasi tersebut dapat terlihat dari hasil Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) maka keberadaan SLIK sangat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

### 1. Bagi Penerima Kredit (Debitur)

- a) Mempermudah dan mempercepat proses persetujuan kredit;
- b) Terciptanya reputasi kredit yang baik yang mempermudah debitur memperluas cakupan akses kredit dari lembaga pemberi kredit;
- c) Sebagai alat kontrol terhadap kebenaran data kredit yang dilaporkan oleh lembaga pemberi kredit

### 2. Bagi Lembaga Pemberi Kredit (Kreditur)

- a) Sebagai informasi pendukung dalam melakukan analisa kredit;
- b) Mempermudah analisa untuk pemberian kredit atau pembiayaan, sehingga dapat memperlancar proses penyediaan dana dan pengambilan keputusan persetujuan kredit;

- c) Penerapan manajemen risiko antara lain untuk menghindari kegagalan membayar pinjaman yang telah diberikan dan mencegah penipuan;
- d) Meningkatkan efisiensi penyaluran kredit.

### 3. Bagi Masyarakat dan Pemerintah

- a) Bagi masyarakat, Informasi Debitur yang terdapat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan yang diperoleh diharapkan mampu memberikan edukasi positif untuk senantiasa bertanggung jawab terhadap kewajiban kredit yang telah diterimanya. Membantu melakukan kontrol terhadap kebenaran dan keakuratan data yang disampaikan lembaga keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b) Mendorong terciptanya suatu industri perkreditan yang sehat;
- c) Memperluas dan mempermudah akses pengusaha golongan Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap sistem perbankan.

### D. Tinjauan Umum Tentang Daftar Hitam Perbankan

Berdasarkan kamus istilah populer perbankan Bank Indonesia, *Blacklist* merupakan daftar nama para nasabah individu atau badan hukum, bahkan perusahaan yang terkena sanksi dari bank karena dirinya telah melakukan beberapa tindakan tertentu yang bisa merugikan pihak bank dan masyarakat<sup>79</sup>. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) contoh dari *blacklist* yaitu individu atau perusahaan yang telah melakukan penarikan dana berupa cek kosong. Atas

---

<sup>79</sup>Nanci Mamarimbing, “**Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering)**”, (Jurnal Hukum Lex Crimen vol vi no.3, Mei 2017), hlm 49.

tindakan tersebut, maka Bank Indonesia akan melakukan *blacklist* kepada nasabah yang melakukan penarikan cek kosong. Nama mereka akan direkam dalam sebuah Daftar Hitam Nasional (DHN). Jika nama seseorang tercantum di dalam daftar hitam nasional, maka akan menyebabkan yang bersangkutan terkena sanksi penutupan rekening bahkan sampai dapat dituntut tindakan pidana.

*Blacklist* yang dikenal masyarakat saat ini sebenarnya mengacu kepada data para debitur yang bermasalah yang terekam dalam Sistem Informasi Keuangan Debitur Bank Indonesia. Sistem Informasi Keuangan Debitur ini adalah suatu sistem yang dapat mengumpulkan berbagai informasi tentang fasilitas kredit yang biasanya dilaporkan secara rutin dari beberapa lembaga keuangan.

Lembaga keuangan yang termasuk dalam anggota Sistem Informasi Keuangan salah satunya adalah Bank Umum. Bank Umum ini akan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah sebelumnya dipegang oleh Bank Indonesia yang berperan sebagai regulator moneter dan sistem pembayaran di Indonesia. Sistem Informasi Keuangan ini sangat terpadu sehingga bank yang satu akan mengetahui informasi dan profil dari calon nasabah yang hendak melakukan kredit, apakah memiliki tanggungan terhadap bank yang lain ataukah tidak.<sup>80</sup>

Seorang calon debitur yang akan mengajukan kredit kepada suatu bank, maka terlebih dahulu akan dilakukan penilaian dan evaluasi oleh pihak bank terkait terhadap informasi keuangan debitur nya. Penilaian tersebut bertujuan

---

<sup>80</sup>*Ibid.*

untuk mengetahui apakah seseorang memang layak menerima kredit atau tidak, mampu untuk membayar hutang kredit atau tidak, dan sejumlah pertanyaan yang lain. Dalam menilai dan mengevaluasi profil debitur tersebut, pihak bank selalu menggunakan Sistem Informasi Keuangan Debitur untuk mengecek data debitur. Jika debitur memiliki riwayat kredit yang baik, maka debitur layak untuk mendapatkan kredit dari bank tersebut. Namun, jika riwayat calon debitur buruk, maka pihak bank akan menolak pengajuan kredit tersebut.<sup>81</sup>



---

<sup>81</sup>*Ibid.*

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian normatif adalah suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.<sup>82</sup>

Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>83</sup> Penulis memilih penelitian yuridis normatif karena penulis berusaha melakukan analisa yuridis tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah yang terkena daftar hitam akibat kesalahan bank “(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015)”. Peneliti akan mengkaji rumusan masalah serta norma dan kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan mengacu dan berlandaskan pada norma-norma hukum yang terdapat

---

<sup>82</sup>Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm 35.

<sup>83</sup> Soerjono Soekanto, dkk., **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, (Jakarta:Rajawali, 2008), hlm. 15.



pada aturan perundang-undangan yang ada, serta mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat norma dan bahan-bahan yang berasal dari literatur.

## B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan analitis atau *analytical approach* dan pendekatan kasus atau *case approach*.

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah :

“pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi”

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>84</sup> Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Perbankan, Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>84</sup> Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Cet. 1, (Bandung, :PT. Citra AdityaBakti, 2004), hlm. 52.

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis dilakukan untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum sehingga dilakukan melalui dua pemeriksaan.<sup>85</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis dimana penulis ingin mengkaji dan menemukan makna yang dikandung dalam istilah pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah yang terkena daftar hitam akibat kesalahan bank “(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015)”.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam penelitian normatif, Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari mengenai penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan oleh hukum dalam praktik nya. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus oleh majelis hakim sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>86</sup>

Peneliti akan mempelajari kasus mengenai kesalahan bank, yaitu Bank Mandiri (Persero) Tbk, cabang Kota Solo, Sriwedari dalam menjatuhkan daftar hitam kepada nasabah nya yang merupakan seorang pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu

---

<sup>85</sup> Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Cetakan Keempat, (Jakarta: Banyumedia, 2008), hlm.310.

<sup>86</sup> *Ibid.*

aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### 1. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang disusun secara hierarkis yang isinya memiliki kekuatan hukum mengikat kepada masyarakat yaitu perundang-undangan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan perlindungan hukum bagi debitur yang terkena daftar hitam akibat kesalahan bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015) adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.3821);
- e. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
- f. Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Sistem Informasi Debitur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4784);
- h. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.);
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5431);

- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus, *e-journal*, dan lain-lain yang dapat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder .

## 2. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Daerah Kota Malang;
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya;
- c. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- d. Buku-buku, literatur, dan jurnal hukum milik pribadi penulis

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik memperoleh bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Hukum Bank Terhadap Nasabah yang Terkena Daftar Hitam Akibat Kesalahan Bank “(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015)” adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- b. Pengumpulan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal hukum, serta artikel ilmiah online;
- c. Pengumpulan bahan hukum tersier menggunakan kamus cetak maupun kamus online yang tersedia di situs-situs internet.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Pada penelitian ini, peneliti mengambil Teknik Analisis Bahan Hukum dengan menggunakan teknik interpretasi yang sesuai, yaitu interpretasi Gramatikal dan Interpretasi Sistematis. Interpretasi Gramatikal adalah menafsirkan kata-kata yang ada di dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa, kaidah hukum tata bahasa<sup>87</sup>. Sedangkan Interpretasi Sistematis adalah menafsirkan undang-undang

---

<sup>87</sup>Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum**, Edisi Kedua, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), hlm.166.

sebagai suatu bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain.<sup>88</sup>

Melihat dari Sumber Bahan Hukum yang digunakan oleh peneliti, yaitu Sumber Bahan Hukum Primer, Sumber Bahan Hukum Sekunder, dan Sumber Bahan Hukum Tersier, maka di dalam penelitian ini peneliti mengambil teknik Analisis dengan interpretasi gramatikal, yakni peneliti menafsirkan kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku, serta makalah-makalah. Penelitian ini juga menggunakan interpretasi sistematis, yakni peneliti melakukan penafsiran perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang yang lain.

#### **F. Definisi Konseptual**

Adalah suatu pembahasan mengenai pengertian atau istilah yang dipergunakan dalam penelitian sesuai tema penelitian yang dapat merujuk pada peraturan perundang-undangan, berbagai literatur, dan pendapat ahli. Adapun batasan-batasan pengertian atau istilah yang berkaitan dengan tema penelitian penulis, sebagai berikut :<sup>89</sup>

- a. Tanggung Jawab Hukum Bank : Suatu keadaan dimana pihak bank diharuskan melakukan tindakan penyelesaian atas tuntutan nasabah nya atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh bank sebagai bentuk pemenuhan kewajiban

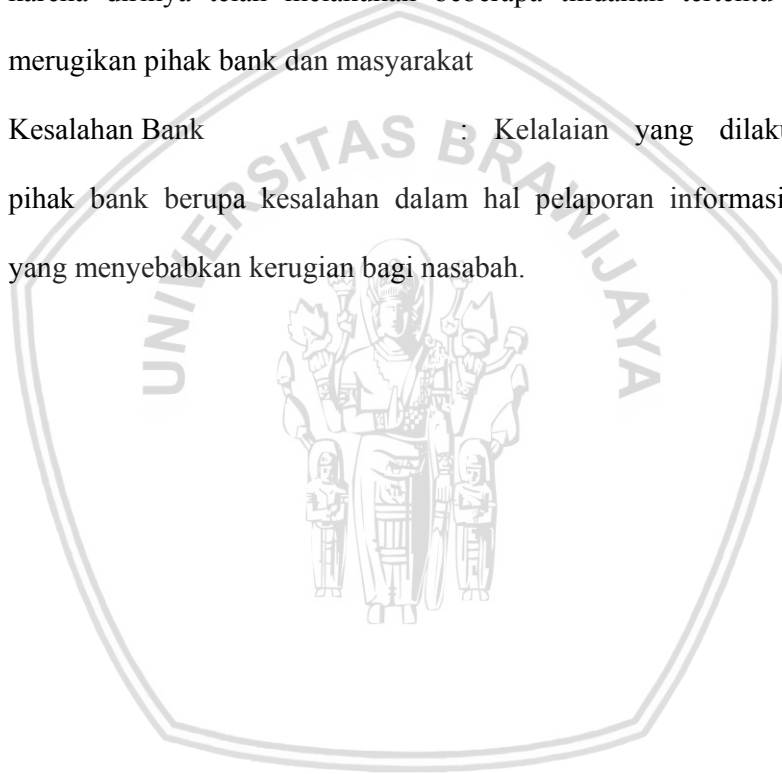
---

<sup>88</sup> Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 23.

<sup>89</sup> [www.safaat.lecture.ub.ac.id/pedoman\\_penulisan](http://www.safaat.lecture.ub.ac.id/pedoman_penulisan), diakses pada tanggal 21 Maret 2018, Pukul 17.00 WIB.



- b. Nasabah : Orang atau badan yang memiliki rekening simpanan ataupun pinjaman pada bank dan berperan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank/perbankan
- c. Daftar Hitam Perbankan : Daftar nama para nasabah individu atau badan hukum, bahkan perusahaan yang terkena sanksi dari bank karena dirinya telah melakukan beberapa tindakan tertentu yang bisa merugikan pihak bank dan masyarakat
- d. Kesalahan Bank : Kelalaian yang dilakukan oleh pihak bank berupa kesalahan dalam hal pelaporan informasi keuangan yang menyebabkan kerugian bagi nasabah.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**A. Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015 Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Bank Kepada Nasabah Dalam Kasus Kesalahan Penjatuhan Daftar Hitam Perbankan oleh Bank Mandiri kepada Sutrisno**

#### 1. Para Pihak

**PT. BANK MANDIRI** (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta, diwakili oleh Senior Vice President, Jacob J.Maitimu, cq. **PT. BANK MANDIRI** (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo Sriwedari, berkedudukan di Jalan Brigjend Slamet Riyadi Nomor 249 Surakarta, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Priska Selviarindi, dan kawan-kawan, SQO Area Solo pada **PT. Bank Mandiri** (Persero) Tbk. Regional VII Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2015; bertindak sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**TUAN SUTRISNO**, bertempat tinggal di Gondang Kulon, RT.002/ RW.005, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri; bertindak sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

## 2. Duduk Perkara

Kronologi awal hingga akhirnya keluar putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015 berawal sejak penggugat yang merupakan seorang pelaku usaha mikro yang bergerak di bidang kayu meubel, yaitu dalam hal pembuatan *meubel*, kusen meja, *buffet*, almari dan sebagainya sesuai pesanan konsumen dengan nama Usaha Dagang (UD) 'Anugerah' yang beralamat di Gondang Kulon RT.002/RW.005, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Wonogiri, Kab Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah. Pengajuan permohonan dilakukan pada tanggal 22 April 2014 yang telah diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dalam Register Perkara Nomor 84/Pdt G/2014/PN Skt.

Penggugat merupakan seorang pelaku usaha mikro yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga memenuhi ketentuan yang telah diatur. Secara otomatis, penggugat berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Terdapat beberapa alasan dari penggugat sehingga mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Awal mulanya, penggugat bermaksud mengembangkan usaha dengan cara mengajukan permohonan fasilitas kredit modal usaha kepada lembaga keuangan, namun pengajuan permohonan penggugat ditolak karena secara melawan hukum, pihak tergugat melalui BM Div. Kartu Kredit telah menerbitkan surat tagihan (*invoice*) tertanggal 06 Maret 2013, atas tunggakan penggunaan kartu kredit senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), padahal

penggugat tidak pernah melakukan perjanjian penggunaan fasilitas kartu kredit tergugat, apalagi melakukan transaksi pembelian dengan kartu kredit tergugat.

Yang kedua, adalah mengenai kelalaian tergugat dalam surat tagihan (*invoice*) dalam menuliskan alamat penggugat. Dalam surat tagihan tersebut tertulis a/n CV. “Mulia Jaya” Jl.Raya Pucangsawit No.205, RT.003/RW.005, Kelurahan Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta. Padahal, nama usaha dagang penggugat adalah UD “Anugerah” yang beralamat di Gondang Kulon RT.002/RW.005, Kel.Purwosari, Kec. Wonogiri, Kab Wonogiri.

Sebelum mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Surakarta, penggugat telah berulang kali berusaha menyelesaikan permasalahan terkait surat tagihan yang ditujukan kepada penggugat baik secara lisan maupun surat, yaitu sebanyak 3 kali, yang pertama pada tanggal 7 Februari 2014, yang kedua pada tanggal 14 Februari 2014 dan yang terakhir pada tanggal 23 Februari 2014. Namun, tidak ada itikad baik dari tergugat untuk menyelesaikan permasalahan.

Lembaga keuangan yang menolak permohonan pengajuan fasilitas kredit oleh penggugat antara lain adalah sebagai berikut :

1. PT.Permodalan Nasional Madani (Persero) UlaMM Wonogiri melalui surat No.01/rjct/wngr/1/2014 tanggal 10 Januari 2014;
2. PT.BANK BUKOPIN Cabang Pembantu 3-1 Primkopti Wonogiri melalui Surat No.184179/TSL/TOLAK/2014 tanggal 12 Februari 2014;

3. PT.BANK PUNDI Indonesia, Tbk Kantor Cabang Wonogiri melalui Surat Keterangan tanggal 11 Februari 2014.

Lembaga keuangan tersebut melakukan penolakan terhadap permohonan fasilitas kredit penggugat dikarenakan nama usaha penggugat telah masuk dalam daftar *black list* oleh Bank Indonesia, melalui Surat No : 16/570/DPKL/Slo tanggal 26 Maret 2014. Dalam lembar informasi debitur tersebut disebutkan bahwa penggugat mempunyai tunggakan kartu kredit dari tergugat senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

### 3. Pokok Gugatan

Gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 84/Pdt G/2014/PN Skt atas tindakan tergugat yaitu agar Majelis Hakim dalam perkara tersebut berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan Penggugat;
3. Menyatakan tergugat telah lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan surat tagihan (*invoice*) tanggal 6 Maret 2013;
4. Menyatakan surat tagihan (*invoice*) tanggal 6 Maret 2013 adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya dikarenakan cacat formil;

5. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika;
6. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian non-materiil penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika;
7. Menghukum tergugat menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.Kantor Cabang Solo Sriwedari, terletak di Jl.Brigjend Slamet Riyadi No.249 Surakarta, Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut : Utara (Hak Milik), Selatan (Jalan Raya), Timur (Hak Milik), Barat (Hak Milik). Secara sukarela dan tanpa syarat kepada penggugat, apabila perlu dengan menggunakan bantuan alat negara dan juru sita Pengadilan Negeri Surakarta untuk dilakukan penjualan secara umum (Lelang Terbuka);
8. Menghukum tergugat untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut.

#### SUBSIDAIR :

Memeriksa dan mengadili berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ex aequo et bono*).

#### 4. Memori Kasasi

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah :

1. Keberatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat Atas Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Surakarta yang tidak memperhatikan subjek dalam perkara yang berbeda dengan subyek yang menjadi dasar gugatan termohon kasasi dahulu Penggugat/Terbanding bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat telah memasukkan Nama Usaha Dagang Penggugat Dalam Daftar Kredit Bermasalah Di Bank Indonesia. Pemohon Kasasi merasa *Judex Facti* telah keliru memahami permasalahan, karena Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding tidak pernah berurusan dengan nama usaha Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding (UD Anugerah). Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding tidak pernah memberikan fasilitas kredit kepada usaha Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding yang menurut Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding adalah bernama UD Anugerah dan memasukkan nama usaha tersebut dalam daftar Debitur bermasalah Bank Indonesia;

2. Mengenai pilihan alamat pengiriman kartu kredit dan tagihan tersebut telah dilakukan klarifikasi dan konfirmasi ulang oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dan tidak terdapat sanggahan dan atau koreksi



mengenai hal tersebut. Menurut Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat, Para Pihak jika akan menjadi pertimbangan dalam suatu putusan oleh Hakim seharusnya adalah pernyataan yang memiliki kualitas hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis. Sementara keterangan atau pernyataan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding yang menyatakan “merasa belum pernah menerima kartu kredit” adalah pernyataan yang ragu-ragu, tidak pasti, dan tanpa bukti sehingga seharusnya pernyataan seperti dimaksud tidak memiliki kualitas yuridis sama sekali;

3. Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pemanding tidak pernah melakukan hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan usaha dagang milik Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding memanfaatkan surat Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pemanding tanggal 30 April 2014 untuk kepentingan dari usaha dagang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding karena tidak diperolehnya pinjaman dari sejumlah lembaga keuangan yang ditolak karena (menurut Terbanding dahulu Penggugat) nama usaha dagang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah masuk *blacklist* kredit bermasalah di Bank Indonesia. Padahal surat Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pemanding tanggal 30 April 2014 tidak pernah menyinggung mengenai nama usaha dagang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

4. Pemohon Kasasi dahulu Tergugat /Pembanding tegas menolak putusan *Judex Facti* dalam perkara yang menghukum Pemohon Kasasi Tergugat/Pembanding untuk membayar ganti kerugian kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding karena dalil Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menurut Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat sama sekali tidak terbukti. Dan Mengenai kerugian yang diasumsikan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding timbul akibat masuknya nama usaha Termohon Kasasi/Penggugat dahulu Terbanding (UD Anugerah) dalam daftar hitam kredit bermasalah Bank Indonesia pun tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding.

#### **5. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung**

1. Alasan-alasan permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Hal tersebut terbukti dari surat Tergugat/Pemohon Kasasi tanggal 30 April 2014 kepada Penggugat/Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa setelah tanggal 12 Mei 2014, Tergugat/Pemohon Kasasi akan segera membersihkan status *blacklist* atas usaha dagang Penggugat/Termohon Kasasi namun tidak terlaksana sampai adanya gugatan ini, oleh karena kelalaian Tergugat/Pemohon Kasasi tersebut menimbulkan kerugian Penggugat/Termohon Kasasi sehingga tidak dapat memperoleh pinjaman modal dari lembaga keuangan lainnya;

2. Dengan adanya alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, majelis hakim berpendapat, pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

3. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim di atas, dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Bank Mandiri, tersebut harus ditolak;

4. Karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi tersebut.

## 6. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015

Dari pertimbangan yang ada diatas, majelis hakim kemudian memutuskan bahwa :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Sebelum nya, pihak tergugat mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Semarang. Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berdasarkan Putusan Nomor 424/Pdt/2014/PT.SMG adalah sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 Agustus 2014. Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Skt, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Sedangkan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Skt adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tergugat yaitu PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kantor Cabang Solo Sriwedari telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa surat tagihan (invoice) tertanggal 6 Maret 2013 adalah batal demi hukum dan cacat formil;
4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Membebaskan tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah );
6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya

Putusan Kasasi Oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut, menguatkan putusan terdahulu yaitu Putusan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri dan putusan tingkat banding. Majelis hakim menolak kasasi oleh pemohon kasasi dahulu tergugat atau terbanding karena menurut majelis <sup>hakim</sup>, putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang seperti yang telah dimohonkan kasasi oleh pemohon kasasi, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi PT. Bank Mandiri, tersebut harus ditolak dan berimplikasi pihak yang dinyatakan bersalah wajib melakukan tanggung jawab hukum berupa membayar sejumlah ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

### A.1 Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1527 K/Pdt/2015

Hakim beserta segala kewajiban nya seperti tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 tahun 2009 adalah sebagai *sense of justice of the people*. “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”<sup>90</sup>. Artinya untuk melaksanakan peran tersebut, hakim kemudian harus terjun ke tengah-tengah masyarakat agar dapat secara langsung mengenal, merasakan, dan mampu untuk menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian nantinya hakim akan memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Tugas hakim bukan hanya sebagai penerap hukum (undang-undang) atas perkara-perkara di Pengadilan atau hanya bertindak sebagai *‘agent of conflict’* saja. Namun, tugas hakim juga mencakup melakukan penemuan dan pembaruan hukum. Hakim yang ideal, selain memiliki kecerdasan yang tinggi, juga harus memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, kemudian mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai-nilai keagamaan, kesusilaan, sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat melalui setiap putusan yang telah dibuatnya.<sup>91</sup> Karena pada hakikatnya, mahkota seorang hakim bukan terletak pada ketukan palu nya, melainkan pada bobot atau kualitas dari putusan yang dihasilkan oleh nya.

---

<sup>90</sup>Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>91</sup>Djazuli Bchar, **Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum**, edisi revisi, (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), hlm. 125.

Urgensi pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi perdata untuk memenuhi keadilan sangat beralasan juga harus ada dan tertulis dalam putusnya, karena :<sup>92</sup>

- a. Putusan hakim harus berpedoman pada unsur yuridis, filosofis, dan sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- b. Dalam mempertimbangkan putusnya, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan buruk dari tergugat. Penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;
- c. Surat putusan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan tergugat.

Majelis Hakim dalam mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015 terlebih dahulu mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan, dari sejak tingkat pertama, banding hingga kasasi. Sehingga keputusan majelis hakim yang

---

<sup>92</sup>Ziaurrani Mahendra, "Pertimbangan dan faktor penyebab hakim mengabulkan permohonan dispensasi umur perkawinan (Studi Dalam Perspektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)", (Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2014), hlm. 16.



ditetapkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Setelah pemeriksaan selesai, Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan ditetapkan. Pemeriksaan atas perkara dalam kasus tersebut dianggap telah selesai karena telah adanya putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri tingkat pertama.

Dalam pertimbangannya inti dari putusan Hakim adalah :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk., tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Jika mengacu kepada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang telah diperkuat oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang yaitu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tergugat yaitu PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kantor Cabang Solo Sriwedari telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa surat tagihan (*invoice*) tertanggal 6 Maret 2013 adalah batal demi hukum dan cacat formil;

4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
5. Membebaskan tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya.

Berdasar dari segi hukum (*yuridis*), diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan yaitu setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari penggugat dan tergugat, baik yang dibacakan di muka persidangan oleh Kuasa Hukum masing-masing pihak maupun saksi yang hadir di muka persidangan.

Penulis akan melakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung yang memutus perkara antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Kota Solo, Sriwedari sebagai pemohon kasasi dahulu penggugat/pembanding juga terbanding melawan Sutrisno sebagai termohon kasasi dahulu tergugat/terbanding juga pembanding.

Kasas merupakan pembatalan oleh Mahkamah Agung atas putusan pengadilan tingkat tertinggi hakim yang tidak atau bertentang dengan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>93</sup> Kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membetulkan hukum.

Pengertian kasasi menurut Menurut Wijono Prodjodikoro adalah “salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan

---

<sup>93</sup> R.Soeroso, **Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara dan Proses Persidangan)**, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm.90.

Pengadilan-Pengadilan lain.” Sedangkan dasar hukum bagi Pengadilan Kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No.14 Tahun 1970.<sup>94</sup>

Tugas dan wewenang Mahkamah Agung, yakni memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Permohonan kasasi;
- b. Sengketa tentang kewenangan mengadili;
- c. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Adapun Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, hal ini yang sering terjadi di dalam praktek. Pengertian salah menerapkan atau melanggar hukum banyak terjadi karena perkembangan hukum meningkat sedangkan buku-buku terutama buku yurisprudensi masih jarang diterbitkan;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Contohnya, apabila putusan dijatuhkan dan surat putusannya tidak dimulai dengan kalimat-

---

<sup>94</sup>M. Yahya Harahap, **Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata**, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 22.

kalimat “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>95</sup>

Putusan atau penetapan Pengadilan dari semua lingkungan Peradilan dalma tingkat kasasi akan dibatalkan, karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang seperti dalma hal salah menerapkan melanggar hukum yagn berlaku.<sup>96</sup>

Oleh karena itu pemeriksaan kasasi dalam perkara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Solo, Sriwedari sebagai pemohon kasasi dahulu penggugat/pembanding juga terbanding melawan Sutrisno sebagai termohon kasasi dahulu tergugat/terbanding juga pembanding meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, baik yang meliputi bagian daripada putusan yang merugikan maupun yang menguntungkan pemohon kasasi. Artinya, pada tingkat kasasi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkara dan oleh karenanya pemeriksaan kasasi tersebut tidak dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ke 3 (tiga). Dalam pemeriksaan kasasi, perkara tidak serta merta kemudian menjadi “mentah” lagi, sehingga mengenai faktanya sudah tidak dapat ditinjau lagi. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi hanya meneliti soal penerapan hukumnya saja, yaitu apakah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimohonkan kasasi itu “melanggar hukum” atau “tidak melanggar hukum”.

---

<sup>95</sup> [www.perpustakaanmahkamahagung.go.id](http://www.perpustakaanmahkamahagung.go.id), diakses pada tanggal 21 Maret 2018, pukul 16.00 WIB.

<sup>96</sup> Retnowulan Susanto,dkk., **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**, , (Bandung:Mandar Maju, 2001), hlm.166.

## 1. Analisis Perbuatan Melawan Hukum

Untuk mengetahui apakah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari melakukan suatu Perbuatan melawan hukum, maka terlebih dahulu kita harus melihat apakah perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah syarat-syarat *materiil* yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini bersifat kumulatif, artinya semua unsur harus terpenuhi.

Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi :

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut mengganti kerugian tersebut”

Berbicara mengenai perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata tersebut, dalam penerapan konsepsi perbuatan melawan hukum sering kali dipersamakan dengan konsepsi perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Padahal keduanya merupakan konsepsi yang sangat berbeda satu dengan lainnya, walaupun keduanya sama-sama bersumber dari perikatan, yaitu konsepsi *wanprestasi* berasal dari perikatan yang lahir dari perjanjian dan konsepsi perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang lahir dari undang-undang.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup>Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum: suatu perbandingan dengan *wanprestasi*”, (Jurnal Hukum Lex Jurnalica Vol 10, No.2, 2013), hlm. 27.

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Unsur-unsur dari pasal 1365 KUHPerdara tersebut adalah :

### **1.) Adanya suatu perbuatan**

Perbuatan yang dimaksud tidak hanya perbuatan yang bersifat positif (aktif) saja, melainkan juga mencakup perbuatan negatif (pasif). Perbuatan positif merupakan perbuatan yang dengan positif dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang merugikan orang lain. Sedangkan perbuatan yang negatif adalah manakala seseorang tidak melakukan suatu perbuatan/berdiam diri sedangkan menurut orang tersebut harus melakukan tindakan dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>98</sup>

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari melakukan perbuatan positif (aktif) berupa:

1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari menerbitkan surat tagihan pemakaian Kartu Kredit sebesar Rp. 7.990.500,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), yang ditujukan kepada Penggugat karena menurut dalih PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari, penerbitan surat tagihan pemakaian kartu kredit tersebut telah sesuai data yang ada mengenai telah digunakannya kartu kredit tersebut pada tanggal 28 Maret 2013;

---

<sup>98</sup>Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Perdata tentang Perjanjian-Perjanjian Tertentu**, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 18.

2. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari tidak segera menanggapi keberatan Penggugat, justru memberikan informasi data sebagai kredit yang tidak dibayar atau kredit macet ke Bank Indonesia, kemudian Bank Indonesia mengeluarkan surat sebagai daftar *blacklist* terhadap usaha dagang Penggugat untuk memperoleh modal;

3. Dari bukti surat yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari tertanggal 30 April 2014, pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari mengirim surat tanggapan kepada Penggugat perihal klarifikasi tagihan kartu kredit Penggugat, setelah PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari melakukan Investigasi dan penelusuran, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari mengakui bahwa hal tersebut akibat kelalaian dari pihak nya, dan menyatakan akan menghapus status data *blacklist* usaha Penggugat ke Bank Indonesia yang akan dimunculkan setelah tanggal 12 Mei 2014;

4. Melalui surat yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari tertanggal 30 April 2014 pada Penggugat, bahwa setelah tanggal 12 Mei 2014 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari akan membersihkan status *black list* Bank Indonesia atas usaha dagang penggugat, namun ternyata belum juga dilaksanakan sampai perkara tersebut diajukan.



## 2.) Perbuatan tersebut Melawan Hukum

Pengertian perbuatan melawan hukum berkembang semakin luas yang diprakarsai sejak adanya putusan *hoogeraad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen vs Lindenbaum*.<sup>99</sup> Pengertian perbuatan melawan hukum seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata selain perbuatan yang meliputi perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang juga meliputi perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri, kesopanan, dan kesusilaan.

Dalam asas *verbintenissenrecht*, manusia yang satu terlepas dari manusia yang lain. Dalam masyarakat ini manusia yang satu menghormati manusia lain karena manusia itu merupakan sebuah individu. Jika manusia yang satu tidak mengindahkan, maka ia mengganggu tertib masyarakat dan ia dapat ditegur. Perbuatan yang mengganggu keseimbangan ini disebut dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).<sup>100</sup>

Oleh karena perbuatan *onrechtmatige daad* telah mengakibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain tentunya ada konsekuensi yang harus ditanggung akibat perbuatan *onrechtmatige daad* tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, maka kesalahan akibat perbuatan melawan hukum

---

<sup>99</sup> Rosa Agustina, **Perbuatan Melawan Hukum**, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm.13.

<sup>100</sup> Munir Fuady, **Dinamika Teori Hukum**, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 180

menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatan tersebut.<sup>101</sup>

Bertitik tolak dari pasal 1365 KUHPdata tersebut, menurut *Arrest* 1919, suatu perbuatan disebut perbuatan melawan hukum apabila :

#### **a. Melanggar Hak Subjektif Orang Lain**

Melanggar hak subyektif orang lain berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subjektif sebagai berikut:

1. hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
2. hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.<sup>102</sup>

Penggugat yaitu Tuan Sutrisno yang merupakan seorang pengusaha mikro, kecil dan menengah memiliki hak untuk memperoleh pinjaman dari Lembaga Keuangan untuk keberlangsungan usaha miliknya termasuk dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari itu sendiri. Namun, dikarenakan status *black list* yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri kepada Bank Indonesia, menyebabkan penggugat tidak dapat mengajukan kredit kepada Lembaga Keuangan manapun.

---

<sup>101</sup> *Ibid*

<sup>102</sup> [www.ninyasminelisasih.com/perbuatanmelawanhukum](http://www.ninyasminelisasih.com/perbuatanmelawanhukum), diakses pada tanggal 21 Maret 2018, Pukul 17.00 WIB.

Disini, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari telah melanggar hak subyektif dari Tuan Sutrisno. Hak berupa kebebasan, kehormatan, nama baik, tidak dapat diterima oleh nya. Sutrisno yang merupakan seorang pengusaha mikro kecil menengah merasa nama baik nya menjadi tercemar karena kasus kesalahan penjatuhan daftar hitam yang dilakukan oleh Bank Indonesia, otomatis kehormatan nya juga menjadi terganggu akan hal tersebut. Terbukti dengan perkataan saksi yang dihadirkan di persidangan yang tidak lain merupakan pegawai dari penggugat yang mulai menaruh rasa curiga dan tidak percaya kepadanya.

Lalu, hak subjektif yang dilanggar selanjutnya adalah mengenai hak-hak atas kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya. Hak-hak atas kekayaan dalam kasus tersebut, adalah mengenai penolakan yang dilakukan oleh sejumlah lembaga penyedia jasa keuangan terhadap Sutrisno dikarenakan dirinya telah masuk ke dalam daftar *black list* oleh Bank Indonesia. Padahal, ia memiliki hak untuk dapat memperoleh pinjaman untuk keberlangsungan usaha nya. Sehingga, ia dirugikan dalam hal ini dan hak subjektif yang berupa hak atas kekayaan menjadi tidak terpenuhi dan tidak dapat ia rasakan kebermanfaatannya.

#### **b.Bertentangan dengan Kewajiban Hukum Pelaku**

Dalam hal ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Suatu perbuatan adalah melawan hukum bila perbuatan tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.

Yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah kewajiban yang berdasarkan atas hukum yaitu yang mencakup keseluruhan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga yang dimaksud dengan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku adalah perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau larangan.<sup>103</sup>

Adapun perbuatan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari yang bertentangan dengan kewajiban hukum nya yaitu:

1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari memberikan informasi data yang tidak benar kepada Bank Indonesia sebagai kredit macet atas nama Penggugat tanpa diselidiki terlebih dahulu, sehingga usaha Penggugat dianggap menungak kredit dan dimasukkan daftar *black list* oleh Bank Indonesia;
2. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari tidak segera menanggapi keberatan Penggugat, justru memberikan informasi data sebagai kredit yang tidak dibayar atau kredit macet ke Bank Indonesia, kemudian Bank Indonesia mengeluarkan surat sebagai daftar *blacklist* terhadap usaha dagang Penggugat untuk memperoleh modal.

---

<sup>103</sup>Moegni Djojodirjo, **Perbuatan Melawan Hukum**, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2001), hlm. 44.

Sehingga, perbuatan tergugat tersebut harus dinyatakan sebagai suatu kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi penggugat.

### c. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Yang dimaksud dengan kesusilaan adalah norma-norma kesusilaan sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Suatu perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan merupakan perbuatan melawan hukum.<sup>104</sup>

#### 1. Penagihan tunggakan kartu kredit oleh Bank kepada penggugat

Hal ini melanggar:

Kepatutan.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari telah melakukan kesalahan dalam penagihan atas tunggakan kartu kredit dan kesalahan dalam penyampaian informasi debitur kepada Bank Indonesia. Saat penggugat melakukan protes kepada pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari tersebut, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari hanya mengumbar janji saja untuk membersihkan nama tergugat dari daftar hitam Bank Indonesia namun hingga gugatan tersebut diajukan, tidak ada

---

<sup>104</sup> Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 7.

tindakan apapun yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari. Atas hal itulah maka, tindakan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari tersebut sudah jelas bertentangan dengan kepatutan.

## **2. Ketidakprofesionalan Bank dalam Menghormati Hak-hak Penggugat**

Hal ini melanggar Ketelitian dan Kehati-hatian. Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, menyatakan bahwa, “perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian.”<sup>105</sup> Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian ini tidak lain adalah agar bank akan selalu tetap dalam keadaan sehat.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan sikap ketelitian dan kehati-hatian dalam mengambil tindakan saat melakukan penagihan tunggakan kartu kredit karena tidak terlebih dahulu dilakukan proses pengecekan ulang alamat tunggakan kartu kredit tersebut. Sehingga, Hal itu menyebabkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari melakukan kesalahan yang lain yaitu dalam hal pelaporan informasi debitur kepada pihak

---

<sup>105</sup>Pasal 2 Undang-Undang 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Bank Indonesia yang membuat penggugat masuk ke dalam daftar hitam Bank Indonesia.

#### **d. Bertentangan dengan Kepatutan dalam Masyarakat**

Setiap manusia menginsyafi bahwa ia merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan karenanya dalam segala perbuatannya harus memperhatikan kepentingan-kepentingan sesamanya. Harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang oleh masyarakat dianggap sebagai hal yang layak dan patut. Dapat dianggap bertentangan dengan kepatutan adalah:

- a. Perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak
- b. Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, dimana menurut manusia yang normal hal itu harus diperhatikan.<sup>106</sup>

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari bertindak bertentangan dengan kepatutan dalam mengambil tindakan dalam pergaulan sesama anggota masyarakat dan terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan orang lain. Dalam perkara ini, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari sebagai tergugat sangat tidak menghormati hak-hak penggugat yang diperolehnya dengan itikad baik dari Pemerintah Republik Indonesia.

---

<sup>106</sup>Rosa Agustina, **Perbuatan Melawan Hukum**, (Jakarta:Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 41.



### 3.) Adanya Kesalahan

Menurut Mr.L.J. Apeldoorn, kesalahan terjadi apabila pelaku tidak menginginkan timbulnya akibat yang terjadi, tetapi ketika melakukan perbuatan tidak mengupayakan kehati-hatian yang diperlukan sehingga akibat yang tidak diinginkan dan yang dapat diperkirakan akan terjadi. Ketidak jelasan Pasal 1365 KUHPerdara ini sepertinya dapat terjawab pada Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi bahwa “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”<sup>107</sup>

Adapun kesalahan yang berbentuk kesengajaan yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari, yaitu :

1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari memberikan informasi data yang tidak benar kepada Bank Indonesia sebagai kredit macet atas nama Penggugat tanpa diselidiki terlebih dahulu, sehingga usaha Penggugat dianggap menunggak kredit dan dimasukkan daftar *black list* oleh Bank Indonesia;
2. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari tidak segera menanggapi keberatan Penggugat, justru memberikan informasi data sebagai kredit yang tidak dibayar atau kredit macet ke Bank Indonesia, kemudian Bank Indonesia mengeluarkan surat sebagai daftar *blacklist* terhadap usaha dagang Penggugat untuk memperoleh modal.

---

<sup>107</sup>Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

#### 4. ) Adanya Kerugian

Perbuatan yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari mengenai kesalahan pelaporan informasi debitur kepada Bank Indonesia atas nama penggugat menimbulkan kerugian bagi pihak penggugat. Untuk memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPdata, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :

- a. Kerugian *materiil*, yang terdiri dari kerugian yang nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, dan
- b. Kerugian *moril* atau *immaterial* yang bersifat *idiil* berupa ketakutan, penghinaan, rasa sakit, stress, jatuh nama baik dan kehilangan kesenangan hidup.

Ganti rugi *immateriil* adalah pemberian sejumlah uang yang tidak dapat diperhitungkan secara matematis, namun biasanya ditetapkan pada kebijaksanaan hakim yang disyaratkan pada jumlah ganti rugi yang sewajarnya. Kewajaran dari jumlah ganti rugi tersebut tergantung dari beberapa keadaan atau hal seperti beratnya beban mental yang dipikul korban, status dan kedudukan dari korban, situasi dan kondisi dimana perbuatan melawan hukum terjadi, situasi dan kondisi dimana mental dari korban, situasi dan kondisi dari pelaku, latar belakang

dilakukannya perbuatan melawan hukum, jenis perbuatan melawan hukum, yaitu apakah ada unsur kesengajaan, kelalaian dan tanggung jawab mutlak.<sup>108</sup>

Adapun kerugian yang dialami oleh Tuan Sutrisno akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari antara lain adalah :

1. Penggugat tidak dapat melakukan pinjaman kredit untuk modal usaha kepada sejumlah lembaga keuangan akibat dikeluarkannya *blacklist* oleh Bank Indonesia atas nama penggugat;
2. Kerugian *immateriil* akibat tindakan yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari adalah, penggugat mengalami kesulitan dalam permodalan akibat pengajuan pinjaman kredit modal usaha selalu ditolak oleh Lembaga Keuangan. Selain itu, penggugat tidak dipercaya oleh para pegawai nya karena dianggap memiliki hutang yaitu berupa tunggakan atas kartu kredit.

#### **5.) Adanya hubungan Kausal (sebab-akibat) antara Perbuatan yang Dilakukan dengan Kerugian yang Ditimbulkan**

Pasal 1365 KUHPerdara dapat diketahui bahwa suatu perbuatan tertentu dapat disebut sebagai sebab (*causa efficiens*) dari suatu peristiwa tertentu. Yang dimaksud dengan sebab adalah sesuatu yang dengan bekerjanya menimbulkan perubahan, yang telah menimbulkan akibat. Hubungan kausal atau hubungan sebab akibat menjadi persyaratan penting karena untuk membuktikan antara

---

<sup>108</sup>*Ibid*, hlm. 135.

perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kerugian yang dialami harus terhubung dalam suatu kerangka kausalitas. Dengan hubungan kausal tersebut, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari dengan kerugian yang dialami oleh penggugat, yaitu :

1. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari yang melakukan kesalahan dalam melakukan tagihan atas tunggakan kartu kredit kepada pihak penggugat yang menyebabkan nama baik penggugat menjadi tercemar
2. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari tidak segera menanggapi keberatan Penggugat, justru memberikan informasi data sebagai kredit yang tidak dibayar atau kredit macet ke Bank Indonesia, kemudian Bank Indonesia mengeluarkan surat sebagai daftar *blacklist* terhadap usaha dagang Penggugat untuk memperoleh modal. Hal tersebut menyebabkan penggugat dirugikan dan tidak dapat mengajukan pinjaman modal kepada sejumlah lembaga keuangan.

## **A.2 Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015 Terhadap Pihak Bank dan Nasabah**

Implikasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keterlibatan atau keadaan yang terlibat.<sup>109</sup> Telaah mengenai implikasi suatu kaidah hukum tentunya juga memerlukan suatu gambaran tentang sasaran ideal yang hendak dicapai oleh kaidah hukum tersebut, oleh karena perlu pula dibahas tentang tujuan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015.

Setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015 dibacakan, maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai implikasi yuridis atau akibat terhadap pihak yang bersengketa. Akibat dari putusan tersebut adalah, pihak yang kalah harus mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela. Dalam hal ini, pihak yang kalah adalah tergugat yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari. Apabila pihak tergugat tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri, maka dapat melakukan upaya hukum.

Setelah semua upaya hukum ditempuh, akhirnya putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Akibatnya terhadap putusan tersebut adalah pihak yang kalah harus melaksanakan putusan dengan sukareka. Dengan demikian selesailah perkara. Akan tetapi apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka dapat dilakukan pelaksanaan putusan secara paksa (eksekusi) oleh Pengadilan. Pelaksanaan putusan hakim dalam perkara perdata

---

<sup>109</sup> Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa**, Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.529.

dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 2004, 195 ayat (1), 197 ayat (2) HIR, 206 ayat (1), 209 ayat (1) Rbg).<sup>110</sup>

Tujuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015 tentang penjatuhan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah dapat dianalisis melalui penelusuran dan pemahaman isi teks putusan tersebut. Dalam memahami secara utuh tujuan putusan tersebut, perlu dikaitkan dengan teori mengenai tujuan hukum. Terdapat beberapa pemikiran mengenai tujuan hukum. Achmad Ali membedakannya menjadi dua kelompok, yaitu ajaran konvensional dan ajaran modern. Ajaran konvensional terdiri dari paham-paham ekstrem antara lain ajaran etis yang menyatakan tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan, ajaran utilitis yang menyatakan tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan sebesar-besarnya, dan ajaran normatif-dokmatif yang menyatakan tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.<sup>111</sup> Berbeda dengan ajaran konvensional yang condong pada satu aspek, ajaran modern memiliki pemahaman-pemahaman yang menerima keadilan, kemanfaatan, dan kepastian sebagai tujuan hukum, namun dengan prioritas tertentu, yang kemudian melahirkan ajaran prioritas baku dan ajaran prioritas kasuistik.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup>Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, (Yogyakarta:Universitas Atma Jaya,2000), hlm.347.

<sup>111</sup>Supriyanta, "**Realisme Hukum dan Kritiknya terhadap Positivisme Hukum**", (Jakarta:Makalah Dinamika Hukum,2011), hlm.18.

<sup>112</sup>Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum**, Edisi Kedua, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), hlm.59.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015 memiliki dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat merupakan pihak yang merasa dirugikan atas tindakan dari tergugat sehingga mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Pihak penggugat yang merasa dirugikan tersebut memohon kepada pengadilan negeri agar menghukum tergugat untuk membayar sejumlah ganti rugi. Dalam KUHPdata tidak dijelaskan secara rinci mengenai ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum namun hanya dijelaskan mengenai konsep ganti kerugian adalah mengacu kepada Pasal 1423 KUHPdata.

Berdasarkan pertimbangan hakim, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015 dalam amar putusan nya menyatakan bahwa majelis hakim menolak permohonan kasasi penggugat, dengan diperkuatnya Putusan banding pengadilan Tinggi Semarang terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri, maka tergugat memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dilihat dari isi putusan tersebut, karena ditolak nya permohonan kasasi yang diupayakan oleh tergugat, maka memiliki akibat hukum bagi tergugat wajib melaksanakan isi putusan tersebut dan membayar sejumlah ganti kerugian kepada pihak penggugat.

Menurut analisa penulis, tindakan PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Kantor cabang Solo, Sriwedari telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti yang dimaksud oleh Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi:



“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut mengganti kerugian tersebut”

Menurut bunyi pasal tersebut, dapat di jelaskan unsur-unsur nya yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Adanya perbuatan melawan hukum
- c. Adanya kerugian
- d. Adanya hubungan Kausal (sebab-akibat) antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan

Bank Mandiri Persero, Tbk. Kantor cabang Solo, Sriwedari telah melakukan suatu perbuatan yaitu menerbitkan surat tagihan pemakaian Kartu Kredit sebesar Rp7.990.500,- (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), yang ditujukan kepada Penggugat karena menurut dalih PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari, penerbitan surat tagihan pemakaian kartu kredit tersebut telah sesuai data yang ada mengenai telah digunakannya kartu kredit tersebut pada tanggal 28 Maret 2013, padahal berdasarkan kesaksian penggugat, penggugat tidak pernah memakai Kartu Kredit dari Bank Mandiri.

Sedangkan perbuatan melawan hukum yang meliputi pelanggaran atas hak-hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, dan bertentangan dengan kepatutan di dalam masyarakat yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri

(Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari yaitu, Disini, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari telah melanggar hak subyektif dari Tuan Sutrisno. Hak berupa kebebasan, kehormatan, nama baik, tidak dapat diterima oleh nya. Sutrisno yang merupakan seorang pengusaha mikro kecil menengah merasa nama baik nya menjadi tercemar karena kasus kesalahan penjatuhan daftar hitam yang dilakukan oleh Bank Indonesia, otomatis kehormatan nya juga menjadi terganggu akan hal tersebut. Terbukti dengan perkataan saksi yang dihadirkan di persidangan yang tidak lain merupakan pegawai dari penggugat yang mulai menaruh rasa curiga dan tidak percaya kepadanya. Hak subjektif yang lain mengenai hak-hak atas kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya mengenai penolakan yang dilakukan oleh sejumlah lembaga penyedia jasa keuangan terhadap Sutrisno dikarenakan dirinya telah masuk ke dalam daftar *black list* oleh Bank Indonesia. Padahal, ia memiliki hak untuk dapat memperoleh pinjaman untuk keberlangsungan usaha nya.

Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yaitu, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari memberikan informasi data yang tidak benar kepada Bank Indonesia sebagai kredit macet atas nama Penggugat tanpa diselidiki terlebih dahulu, sehingga usaha Penggugat dianggap menunggak kredit dan dimasukkan daftar *black list* oleh Bank Indonesia, dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari tidak segera menanggapi keberatan Penggugat, justru memberikan informasi data sebagai kredit yang tidak dibayar atau kredit macet ke Bank Indonesia, kemudian Bank Indonesia

mengeluarkan surat sebagai daftar *blacklist* terhadap usaha dagang Penggugat untuk memperoleh modal.

Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang dilakukan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari adalah dalam kesalahan penagihan atas tunggakan kartu kredit dan kesalahan dalam penyampaian informasi debitur kepada Bank Indonesia. Saat penggugat melakukan protes kepada pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari tersebut, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari hanya mengumbar janji saja untuk membersihkan nama tergugat dari daftar hitam Bank Indonesia namun hingga gugatan tersebut diajukan, tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari.

Bertentangan dengan ketelitian dan kehati-hatian adalah melanggar Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari mengenai prinsip kehati-hatian Bank. Tindakan tersebut adalah pada saat melakukan penagihan tunggakan kartu kredit, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari tidak terlebih dahulu melakukan proses pengecekan ulang alamat tunggakan kartu kredit tersebut.

Unsur perbuatan melawan hukum yang terakhir adalah mengenai pelanggaran atas kepatutan dalam masyarakat. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari bertindak bertentangan dengan kepatutan dalam mengambil tindakan dalam pergaulan sesama anggota masyarakat dan terhadap

hal-hal yang menyangkut harta kekayaan orang lain. Dalam perkara tersebut, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari sebagai tergugat sangat tidak menghormati hak-hak penggugat yang diperolehnya dengan itikad baik dari Pemerintah Republik Indonesia.

Unsur adanya kesalahan yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari memberikan informasi data yang tidak benar kepada Bank Indonesia sebagai kredit macet atas nama Penggugat tanpa diselidiki terlebih dahulu, sehingga usaha Penggugat dianggap menunggak kredit dan dimasukkan daftar *black list* oleh Bank Indonesia, dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari tidak segera menanggapi keberatan Penggugat, justru memberikan informasi data sebagai kredit yang tidak dibayar atau kredit macet ke Bank Indonesia, kemudian Bank Indonesia mengeluarkan surat sebagai daftar *blacklist* terhadap usaha dagang Penggugat untuk memperoleh modal.

Unsur mengenai adanya kerugian, yaitu mengenai kerugian secara *materiil* dan *immateriil*. Kerugian secara *materiil* dapat diketahui dari penggugat yang tidak dapat melakukan pinjaman kredit untuk modal usaha kepada sejumlah lembaga keuangan akibat dikeluarkannya *blacklist* oleh Bank Indonesia atas nama penggugat. Sedangkan kerugian *immateriil* yang diderita oleh penggugat adalah penggugat mengalami kesulitan dalam permodalan akibat pengajuan pinjaman kredit modal usaha selalu ditolak oleh Lembaga Keuangan. Selain itu, penggugat tidak dipercaya oleh para pegawai nya karena dianggap memiliki hutang berupa tunggakan atas kartu kredit.

Unsur yang terakhir mengenai hubungan Kausal (sebab-akibat) antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan yaitu perbuatan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari yang melakukan kesalahan dalam melakukan tagihan atas tunggakan kartu kredit yang menyebabkan penggugat masuk ke dalam daftar *blacklist* Bank Indonesia menyebabkan kerugian bagi penggugat karena pengajuan kredit untuk modal usaha penggugat mengalami penolakan dari sejumlah lembaga keuangan.

Dari penjelasan atas unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatas dapat diketahui bahwa Tindakan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari atas penggugat memenuhi semua unsur yang ada secara kumulatif. Sehingga tindakan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berikut merupakan Tabel perbandingan Putusan Majelis Hakim terhadap perkara perbuatan melawan hukum PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengenai kesalahan penjatuhan daftar hitam perbankan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Kasasi.

Tabel.2

Putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan kasasi dalam kasus Sutrisno  
melawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor cabang Solo Sriwedari

Jenis Putusan	Amar Putusan	Implikasi Yuridis
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 84/Pdt G/2014/PN Skt	<p>1.Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;</p> <p>2.Menyatakan bahwa tergugat yaitu PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kantor Cabang Solo Sriwedari telah melakukan perbuatan melawan hukum;</p> <p>3.Menyatakan bahwa surat tagihan (<i>invoice</i>) tertanggal 6 Maret 2013 adalah batal demi hukum dan cacat formil;</p> <p>4.Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);</p> <p>5.Membebankan tergugat</p>	<p>1. Majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat menyebabkan tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)</p> <p>2. Memberikan kesempatan bagi tergugat untuk melaksanakan putusan atau melakukan banding</p>

	<p>untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp.231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);</p> <p>6.Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya</p>	
<p>Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 424/Pdt/2014/PT.SMG</p>	<p>1.Menerima Permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;</p> <p>2.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 Agustus 2014. Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Skt, yang dimohonkan banding tersebut;</p> <p>3.Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima</p>	<p>1.Majelis menguatkan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 Agustus 2014. Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Skt yang menyebabkan pembanding/sebelumnya tergugat diwajibkan untuk menjalankan isi putusan Pengadilan Negeri di tingkat I</p> <p>2. Membuka kesempatan bagi pihak pembanding/sebelumnya tergugat untuk melakukan</p>



	puluh ribu rupiah)	upaya hukum kasasi
Putusan Kasasi Nomor 1527 K/Pdt/2015	<p>1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, tersebut;</p> <p>2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)</p>	<p>1. Penolakan permohonan kasasi tersebut menyebabkan pemohon kasasi wajib melaksanakan putusan pengadilan sebelumnya yaitu pemenuhan kewajiban membayar ganti kerugian</p> <p>2. Penolakan permohonan kasasi tersebut menyebabkan berakhirnya upaya hukum pemohon</p>

BAB IX Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 24 dan Pasal 25 menjelaskan adanya jaminan atas suatu kekuasaan kehakiman yang bebas, serta penjelasan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 , yang berbunyi sebagai berikut :

“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”<sup>113</sup>

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Oleh sebab itulah, maka kekuasaan kehakiman ini harus terbebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan yudisial. Dalam melaksanakan wewenang yudisial, majelis hakim bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila, sehingga putusannya akan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat luas. Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memberikan penegasan bahwa :

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”<sup>114</sup>

Ciri bahwa negara dikatakan sebagai negara hukum ialah ketika hakim memiliki kewenangan yang bebas dan tidak memihak, sehingga ketentuan itu menjadi ketentuan universal.<sup>115</sup>

Seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Istilah tidak memihak ini diartikan tidak harfiah, tidak memihak dalam pengertian tersebut artinya hakim tidak dibenarkan untuk memilih klien yang akan dibela karena dalam menjatuhkan putusannya harus memihak kepada kebenaran. Tidak memihak yang dilakukan oleh majelis hakim berarti, hakim dalam

---

<sup>113</sup>Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>114</sup>Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>115</sup>Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002), hlm. 94.

memberikan pertimbangannya tidak berat sebelah. Dinyatakan dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap suatu perkara, entah itu putusan perdata atau yang lain, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi kewenangannya, masing-masing kearah tegaknya hukum itu sendiri yakni, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>116</sup>

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur suatu perbuatan. Apakah perbuatan dari tergugat tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan unsur yang ada dalam pasal sehingga pertimbangan hakim akan relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>117</sup>

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam

---

<sup>116</sup>Bambang Sugeng Ariadi S,dkk.,“Kajian Penerapan Asas Ultra Petita pada Petitem *ex aequo et bono*”, (Jurnal Hukum Yuridika Volume 29 No.1, edisi Januari-April 2014), hlm 76.

<sup>117</sup>Lilik Mulyadi, **Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya** , (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 193.

persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan pada saksi, keterangan tergugat, dan barang bukti.<sup>118</sup>

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori, yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan. Misalnya, keterangan tergugat, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum perdata. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang tergugat, kondisi tergugat, dll.<sup>119</sup>

Selain pertimbangan yuridis, dari perkara yang diajukan oleh penggugat, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.<sup>120</sup>

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Skt mempertimbangkan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan yaitu mengenai bukti surat dan kesaksian dari para saksi. Pertimbangan majelis hakim tersebut pertimbangan yang bersifat yuridis. Lalu, pertimbangan non-yuridis hakim dalam penjatuhan jumlah ganti kerugian bagi tergugat, hakim mempertimbangkan mengenai status hukum penggugat yang

---

<sup>118</sup>Miftakhul Huda, **Ratio decidendi**, diakses dari [www.miftakhulhuda.com](http://www.miftakhulhuda.com) pada tanggal 18 April 2018, pukul 20.00 WIB.

<sup>119</sup>Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.

<sup>120</sup>Nur Ifitah Isnantiana, **“Legal reasoning hakim dalam pengambilan keputusan perkara di pengadilan”**, (Jurnal Hukum Islamadina Volume 18, No.2, Juni 2017), hlm. 40.

merupakan seorang pengusaha mikro kecil dan menengah, sehingga ganti kerugian yang dibebankan kepada tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dirasa oleh hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Pada tingkat Pengadilan Tinggi, majelis hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Surakarta Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Skt karena berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, banding yang diajukan oleh pembanding dahulu tergugat ditolak karena tidak berdasarkan oleh hukum, mengada-ada dan tidak ada relevansi nya dengan pembanding atau dahulu tergugat.

Pada tingkat kasasi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkara karena dalam pemeriksaan kasasi perkara tidak serta merta menjadi “mentah” lagi, sehingga tinjauan mengenai fakta sudah tidak dapat dilakukan oleh majelis hakim. Dalam tingkat kasasi, majelis hakim hanya meneliti mengenai penerapan hukumnya saja, yaitu apakah Putusan Pengadilan yang di mohonkan kasasi itu “melanggar hukum” atau “tidak melanggar hukum”.

Majelis hakim Mahkamah Agung menolak kasasi oleh pemohon kasasi karena menurut majelis hakim, putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 424/Pdt/2014/PT.SMG dalam perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang seperti yang telah dimohonkan kasasi oleh pemohon kasasi, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut harus ditolak dan berimplikasi pihak yang

dinyatakan bersalah wajib melakukan tanggung jawab hukum berupa membayar sejumlah ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

## **B. Tanggung Jawab Hukum Bank Terhadap Nasabah Yang Terkena Daftar Hitam Akibat Kesalahan Bank**

### **B.1 Penyebab Bank Melakukan Kesalahan dalam Pelaporan Informasi Keuangan**

Kelancaran proses kredit dan penerapan mengenai manajemen resiko kredit yang efektif serta ketersediaan informasi kualitas debitur yang diandalkan dapat dicapai apabila didukung oleh sistem informasi yang utuh dan komprehensif mengenai profil dan kondisi debitur, terutama bagi debitur yang sebelumnya telah memperoleh penyediaan dana yang data-data nya terdapat dalam Sistem Informasi Keuangan. Sistem Informasi Keuangan merupakan sistem yang berfungsi antara lain sebagai sarana pertukaran informasi debitur dan fasilitas kredit dari Bank dan Lembaga Pembiayaan.<sup>121</sup>

Dalam pelaporan sistem informasi keuangan tersebut, tidak mustahil jika bank melakukan kesalahan. Jika di kemudian hari debitur hendak mengajukan permohonan penyediaan dana atau pembiayaan kredit dengan suatu bank, maka debitur tersebut otomatis akan mempunyai sejumlah hutang di bank dengan jangka waktu pelunasannya sesuai dengan kesepakatan diantara pihak debitur dan

---

<sup>121</sup> Nindita Citra Utami, “**Kesalahan Dalam Informasi Sistem Informasi Debitur Dalam Pemberian Kredit Dikaitkan Dengan Manajemen Risiko Sebagai Penetapan Prinsip Kehati-hatian**”, 2013. Diakses dari: <http://fh.unpad.ac.id/repo/2013/01/kesalahan-dalam-Informasi-sistem-informasi-debitur-dalam-pemberian-kredit-dikaitkan-dengan-manajemen-risiko-sebagai-penetapan-prinsip-kehati-hatian-bank/> pada tanggal 01 April 2018.

kreditur yaitu bank. Sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, maka debitur yang telah melakukan pelunasan kredit di bank yang bersangkutan sesuai jatuh tempo nya, maka dengan demikian debitur tersebut sudah tidak mempunyai suatu hutang lagi kepada pihak bank.

Atau, permasalahan yang kedua yaitu debitur yang hendak melakukan pengajuan kredit pada bank yang sebelumnya tidak pernah melakukan perjanjian pengikatan kredit dengan pihak bank manapun tiba-tiba oleh bank yang hendak dilakukan proses pengajuan kredit ditolak dengan alasan bahwa calon nasabah nya termasuk ke dalam riwayat daftar hitam perbankan akibat kredit macet, padahal di ketahui sebelumnya bahwa debitur tersebut tidak pernah terikat dengan perjanjian kredit dengan pihak bank manapun.

Hal tersebut tentunya memberikan dampak yang sangat merugikan pihak debitur karena debitur kemudian tidak dapat melakukan kredit padahal hal tersebut terjadi karena kesalahan informasi pada Sistem Informasi Keuangan milik debitur yang dilakukan oleh pegawai bank terkait dan bukan merupakan kesalahan debitur.

Faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam pelaporan sistem informasi keuangan antara lain yaitu :

1. Pertama, dalam tahap pembinaan, masih ada *account officer* yang kurang teliti dalam mengolah dan memasukkan data ke dalam sistem. Selain itu karena sikap kurang teliti *account officer*, sering ditemukan dalam praktik adanya data atau berkas debitur yang kurang



lengkap yang diberikan kepada bank. Sehingga bank akan kesulitan dalam mengolah data dan data yang terdapat pada sistem informasi keuangan setelah diolah secara *online* terdapat kesalahan.<sup>122</sup>

2. Kedua, dalam tahap pengawasan, di dalam praktik nya masih terdapat petugas bank yang kemudian memberikan perlakuan khusus kepada debitur namun tanpa mempertimbangkan isi dari peraturan bank mengenai prosedur pemberian pembiayaan kredit.

3. Ketiga, dalam tahap evaluasi, petugas bank yang bersangkutan tidak menghadiri evaluasi sehingga dalam memberi evaluasi kepada petugas bank menjadi kurang maksimal.<sup>123</sup>

Faktor-faktor tersebut diatas tentunya saling berkesinambungan satu sama lain. Baik itu dalam proses analisa data maupun dalam proses pengawasan serta proses evaluasi. Apabila dalam proses analisa data debitur sudah berjalan dengan baik, dimana petugas bank atau *account officer* sudah cermat dan teliti dalam menganalisis data debitur namun tanpa diimbangi oleh kejujuran dari petugas bank atau *account officer* dalam memasukkan data debitur yang bermasalah, maka kesalahan dalam sistem informasi keuangan pasti akan terus terjadi<sup>124</sup>. Oleh karena itu, selain ketelitian dan kecermatan dari *account officer* dalam memasukkan data debitur ke dalam sistem informasi keuangan juga diperlukan kejujuran setiap *account officer* dalam melayani setiap debitur baik

---

<sup>122</sup>Thesa Febrina Aziza, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Kesalahan Pada Sistem Informasi Debitur (SID)" (Jurnal Ilmiah, FH UB, 2015), hlm. 14.

<sup>123</sup>*Ibid.*

<sup>124</sup>Kuncoro, dkk., *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta & Makassar: BPFE, 2002), hlm. 40.

yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah dalam sistem informasi keuangan.

## **B.2 Tanggung Jawab Hukum Bank Kepada Nasabah Atas Kelalaian Penjatuhan Daftar Hitam**

Setiap Bank baik bank swasta maupun Bank pemerintah tentu memiliki risiko dalam pelaksanaan kegiatannya. Pada kegiatan penerbitan kartu kredit bank tidak menutup kemungkinan bank akan mengalami risiko yang mungkin saja terjadi, namun risiko-risiko tersebut dapat dimitigasi dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang baik dan pelaksanaan SOP pada masing-masing bank<sup>125</sup>. Penulis akan menganalisa tentang tanggung jawab bank kepada nasabah apabila terjadi kelalaian dalam penjatuhan daftar hitam perbankan. Terlebih dahulu, penulis akan menganalisa mengenai tanggung jawab PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari yang melakukan kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan penerbitan kartu kredit di bank.

1. Hak dan kewajiban bank sebagai pihak penerbit dalam melakukan penerbitan kartu kredit.

Kegiatan penerbitan kartu kredit atau penyediaan jasa kartu kredit dikenal beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu :

a.) Penerbit

b.) Pemegang Kartu

---

<sup>125</sup>H.A.S.Moenir, **Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia**, (Jakarta:Bumi Aksara, 2010), hlm. 186.

c.) Perantara

d.) Penjual yang menerima pembayaran dengan kartu kredit<sup>126</sup>

Penulis akan menjelaskan lebih rinci mengenai hak dan kewajiban bank yang merupakan salah satu pihak dalam penerbitan kartu kredit dalam rangka menyalurkan dana ke nasabahnya. Sebagai pihak penerbit secara umum bank memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a. Memberikan kartu kredit kepada pemegangnya
- b. Melakukan pelunasan pembayaran harga barang atau jasa atau *bills* yang disodorkan oleh penjual
- c. Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya tiap satu bulan
- d. Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban dan kemudahan bagi pemegang kartu kredit.<sup>127</sup>

Dan sebagai penerbit Bank secara umum juga memiliki hak sebagai berikut :

- a. Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran kembali uang harga pembelian barang atau jasa.
- b. Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran lainnya, seperti bunga, uang pangkal, uang tahunan, denda dan sebagainya

---

<sup>126</sup>Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.178.

<sup>127</sup>*Ibid.*

- c. Menerima komisi dari pembayaran tagihan kepada perantara penagihan atau kepada penjual.<sup>128</sup>

Dalam kegiatan penerbitan kartu kredit ini bank juga memiliki hak untuk melakukan penilaian kepada calon pemegang kartu mencakup banyak hal yaitu :

- a. *Character* atau watak
- b. *Capital* atau modal
- c. *Capacity* atau kemampuan
- d. *Condition of economic*
- e. *Collateral* atau jaminan<sup>129130</sup>

Bank wajib melakukan penilaian pada poin-poin tersebut diatas sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan dalam rangka menjaga kesehatan bank nya. Hal itu merupakan hak yang secara langsung diberikan kepada bank untuk meminimalisir risiko-risiko yang terjadi dalam penerbitan kartu kredit.

Jika melihat usaha bank dalam menyalurkan kredit ke masyarakat maka usaha di bidang ini sangat banyak berkaitan dengan berbagai peraturan hukum yang ada. Baik dalam ketentuan pemberian kredit itu sendiri dan ketentuan yang berkaitan dengan pengikatan terhadap jaminan yang diserahkan kepada bank. Hal ini disebabkan dimana penyaluran kredit ini bersentuhan langsung dengan

---

<sup>128</sup>Suheimi, **Kejahatan Komputer**, (Jakarta:Andi Offset, 2001), hlm.145.

<sup>129</sup>*Ibid.*

<sup>130</sup>Nurul Fitria, dkk., “Analisis kebijakan pemberian kredit dan pengaruh non performing loan terhadap loan to deposit ratio pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang rantau, Aceh Tamiang periode 2007-2011”,(Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.1, No.1, 2012), hlm. 15.

berbagai sendi perekonomian manusia sehari-hari, demikian juga perekonomian bangsa pada umumnya.<sup>131</sup>

Salah satu kewajiban bank yang wajib dipenuhi dalam kegiatan penyaluran kredit ini adalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian, yang hal ini secara langsung juga disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan. Prinsip ini memberi acuan bagi bank bahwa dalam pemberian kredit tidak bisa dilakukan dengan mudah, tanpa memperhatikan aspek risiko yang muncul dikemudian hari. Tujuan dilaksanakan prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya.<sup>132</sup>

Meskipun Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian, namun tidak mustahil apabila pada suatu saat pegawai bank melakukan kesalahan. Dalam hal ini kesalahan yang dibuat oleh Bank adalah terkait dengan kesalahan penyampaian informasi laporan keuangan debitur kepada Bank Indonesia. Bank melakukan kelalaian dalam penyampaian informasi laporan keuangan debitur sehingga pihak debitur merasa sangat dirugikan. Dan untuk itulah, pihak bank akibat perbuatannya melawan hukum yang dilakukannya wajib melakukan tanggung jawab hukum kepada nasabah nya tersebut.

Sistem Informasi Keuangan adalah sebagai salah satu sarana atau upaya pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan kartu kredit. Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang

---

<sup>131</sup>Sunaryo, **Hukum Lembaga Pembiayaan**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 115.

<sup>132</sup>Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.21.

menyebutkan bahwa “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo, Sriwedari dalam kasusnya dengan Sutrisno dapat dikatakan sebagai bentuk dari pelanggaran prinsip kehati-hatian, meskipun dalam kasus ini bank mandiri telah melakukan tahapan proses penilaian terhadap permohonan kartu kredit Sutrisno antara lain dengan melakukan wawancara melalui telepon. Dalam wawancara dilakukan konfirmasi ulang atas data yang tercantum dalam aplikasi dan tidak terdapat sanggahan maupun koreksi dari Sutrisno, sehingga Bank Mandiri cabang Solo, sriwedari menilai bahwa aplikasi Sutrisno benar adanya. Berdasarkan penilaian permohonan fasilitas kartu kredit Sutrisno, telah disetujui dengan limit Rp.8.000.000,00 dan kartu kredit telah dikirimkan ke alamat sesuai yang dicantumkan Sutrisno dalam aplikasi yang telah ditanda tangannya. Namun Bank Mandiri tidak melakukan konfirmasi ulang apakah kartu kredit tersebut telah diterima oleh Sutrisno atau belum.

Tanpa melakukan tahapan menanyakan apakah kartu kredit sudah diterima atau belum oleh Sutrisno ini, membuat kesalahan Bank Mandiri menjadi berkelanjutan dalam surat tagihan nyata terdapat perbedaan nama dan alamat usaha Sutrisno, dikarenakan tertulis a/n CV.Mulia Jaway, Jl. Raya Pucangsawit No.205, RT 003/RW 005. Kel Pucangsawit, Kec Jebres, Kota Surakarta, padahal nama usaha dagang Sutrisno adalah UD.Anugerah, beralamat di Gondang Kulon Nomor 148, RT 02, RW 05, Purwosari, Kota Wonogiri.

Penagihan disampaikan oleh pihak Bank Mandiri ini tidak dilakukan pembayaran oleh Sutrisno, sehingga akhirnya kartu kredit atas nama Sutrisno sesuai dengan ketentuan yang berlaku harus dilaporkan oleh Bank Mandiri sebagai kartu kredit yang bermasalah karena memiliki tunggakan tagihan.

Dengan tindakan yang dilakukan oleh Bank Mandiri ini Sutrisno dirugikan dengan ditolaknya permohonan kredit modal usahanya oleh lembaga keuangan sebagai berikut :

- a. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) UlaMM Wonogiri melalui Surat No. 01/rjct/wngr/1/2014 tanggal 10 Januari 2014
- b. PT. Bank Bukopin Cabang Pembantu 31-Primkopti Wonogiri melalui Surat No.184179/TSL/TOLAK/2014 tanggal 12 Februari 2014
- c. PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk Kantor Cabang Wonogiri melalui Surat Keterangan tanggal 11 Februari 2014

Dengan alasan nama Sutrisno telah masuk dalam daftar *black list* oleh Bank Indonesia melalui Surat No: 16/570/DPKL/Slo tanggal 26 Maret 2014. Dalam laporan informasi menyebutkan Sutrisno mempunyai tunggakan kartu kredit dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Solo, Sriwedari senilai Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Kelalaian pelaporan dalam praktik yang dilakukan oleh Bank Umum dimana calon debitur pernah melakukan kredit kepada Bank Umum dan kelalaian pelaporan tersebut berakibat penolakan oleh Bank Umum lain kepada calon



debitur untuk meminjam kredit karena calon debitur tersebut dinyatakan telah memiliki kredit macet di Bank Umum yang telah melaporkannya walaupun kondisi yang sebenarnya calon debitur itu tidak pernah menunggak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu berupa pembayaran tagihan, atau misalnya karena adanya kesamaan nama dengan debitur yang memang sedang mengalami kredit macet.<sup>133</sup> Keadaan yang demikian itu seharusnya dapat dihindarkan apabila Bank Umum tersebut dalam memberikan laporannya kepada Bank Indonesia secara benar tentang identitas lengkap dari debitur.

Keadaan tersebut mengakibatkan suatu persoalan mengenai tanggung jawab Bank Umum apabila terjadi kesalahan pada Sistem Informasi Keuangan Debitur tersebut.

Bentuk pelanggaran atas prinsip kehati-hatian dalam penerbitan kartu kredit oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo, Sriwedari, yaitu:

a. Pelanggaran Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang.No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor cabang Solo, Sriwedari dalam melaksanakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sistem Informasi Keuangan ini dapat dikatakan sangat lalai. Tidak ada nya konfirmasi yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari kepada Sutrisno tentang keberlanjutan proses penerbitan kartu kreditnya.

---

<sup>133</sup>Renzie A.C.U, dkk.,**“Tanggung Jawab Bank dalam Penerbitan Kartu Kredit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 84/Pdt G/2014/PN.Skt)”**, (Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, 2017), hlm. 42.

Konfirmasi yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari hanya dilakukan saat menanyakan tentang identitas Sutrisno saat pengajuan penerbitan.

Seharusnya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo, Sriwedari dapat menempuh langkah-langkah yang tidak merugikan bank dan kepentingan atas nasabahnya.

Namun atas kelalaian yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari yang dengan lalai melaporkan nama Sutrisno ke dalam Sistem Informasi Keuangan tanpa adanya langkah-langkah untuk menyelidiki lebih dalam lagi.

b. Pelanggaran pasal 28 ayat (1) Undang-Undang no.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”<sup>134</sup>

Dari pasal ini Bank Indonesia membuahkan peraturan-peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang tata cara menyampaikan laporan keuangan nasabah. Salah satu peraturan itu adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur yang telah diubah menjadi

---

<sup>134</sup> pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jo. Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

Dalam kasus ini PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari telah melanggar pasal 28 ayat (1) Undang-Undang no.23 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, hal ini dikarenakan laporan yang diberikan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo, Sriwedari tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Bank Indonesia pada PBI Nomor 9/14/PBI/2007.

c. Pelanggaran pasal 7 huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

OJK berwenang membentuk suatu peraturan untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam mengawasi jasa-jasa keuangan. Salah satu perwujudan pelaksanaan pasal ini oleh OJK adalah terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang 'Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum'

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari dalam kasus ini telah mengabaikan risiko yang muncul akibat kelalaian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari. Yaitu adalah risiko kepatuhan dikarenakan telah melanggar prinsip kehati-hatian dan risiko reputasi.

d. Pelanggaran Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

Dalam kasus ini PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari melaporkan Sutrisno sebagai nasabah dengan kredit macet dan mendaftarkan namanya ke dalam daftar hitam Bank Indonesia. Hal ini tentu sangat merugikan Sutrisno secara *materiil* dan *immateriil*.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan pasal 7 yang berbunyi :

“pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada OJK dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atas dasar : a.) Temuan pelapor; atau b.) Temuan OJK.”<sup>135</sup>

Maka sepatutnya PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari segera melakukan koreksi laporan kredit macet tersebut dan mengajukan koreksi tersebut kepada Bank Indonesia.

e. Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) huruf e dan huruf h PBI nomor 5/8/PI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

Pada kasus PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari yang lalai dalam menerbitkan surat tagihan dan melaporkan salah satu nasabahnya ke dalam *blacklist* tentu sangat menimbulkan kerugian. Kerugian-

---

<sup>135</sup> Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

kerugian yang diderita oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari yaitu:

1. Ganti rugi yang dibebankan kepada PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari sebesar Rp.100.000.000,00 karena dianggap lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Sutrisno.
  2. Merusak nama baik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari sehingga memungkinkan timbul risiko penurunan reputasi Bank.
- f. Pelanggaran Standar Operasional Prosedur dalam penerbitan kartu kredit

Dalam kasus Sutrisno melawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari didapati bahwa dalam kasus tersebut PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari telah melakukan kelalaian dengan tidak mengkonfirmasi lagi apakah kartu kredit yang dimohonkan oleh Sutrisno sudah diterima olehnya atau belum. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan Sutrisno bahwa dia tidak pernah menerima kartu kredit yang dimohonkan olehnya.

### **1. Tanggung Jawab Hukum Bank berdasarkan KUHPerdata**

Bank Umum yang melakukan kelalaian dalam hal pelaporan sebagaimana diatur dalam Sistem Informasi Keuangan dianggap telah melanggar pasal 1365 KUHPerdata karena menimbulkan kerugian kepada nasabah debitur yang bersangkutan. Oleh karena itu terhadap bank umum yang telah lalai tersebut

dituntut suatu ganti kerugian. Hal ini berlaku juga bagi pegawai bank yang melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian pada nasabah<sup>136</sup>.

Pasal 1365 KUHPerdara mengatur bahwa, “setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut memberikan ganti kerugian.”<sup>137</sup>

Perbuatan melawan hukum termasuk kedalam suatu perbuatan atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang yang mana hal tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan bank. Maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Pasal 1365 KUHPerdara memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan yakni antara lain :<sup>138</sup>

- a. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
- b. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk *natura* atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;

---

<sup>136</sup> Anggita Maynanda Pratiwi, “Perlindungan Hukum terhadap nasabah debitur yang terlapor dalam sistem informasi debitur (sid) Bank Indonesia”, (Jurnal Hukum Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, 2016), hlm. 43.

<sup>137</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>138</sup> Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi”, (Jurnal Hukum Lex Jurnalica, volume 10 nomor 2 Agustus 2013), hlm. 75.

- f. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki

Oleh karena itu Bank atau pegawai bank yang telah menimbulkan kerugian kepada nasabahnya wajib memberikan ganti rugi karena selain telah memberikan informasi yang tidak benar sehingga nasabah tersebut dirugikan karena tidak dapat meminjam kredit dari bank lain juga merupakan pencemaran nama baik.<sup>139</sup>

Dengan terpenuhinya kelima unsur secara kumulatif yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, maka Bank Mandiri dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan dengan demikian, Bank Mandiri harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya.

Dalam hal ini, hakim berwenang untuk menentukan berapa pantas atau sepantasnya harus membayar ganti kerugian tersebut, sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas. Mahkamah Agung Indonesia dalam putusannya “R.Soegijono v. Walikota Kepada Daerah Tingkat II Kota Madya Blitar No.610/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970”, memuat pertimbangan antara lain sebagai berikut :<sup>140</sup>

“Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berupa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal 178 (3) HIR (*ex aequo et bono*).”

---

<sup>139</sup> Joice Irma Runtu Thomas, “Pertanggung jawaban bank terhadap hak nasabah yang dirugikan dalam pembobolan rekening nasabah”, (Jurnal Hukum Lex et societatis, Vol.1/No.1/Januari-Maret, 2013), hlm. 28.

<sup>140</sup> Chaidir Ali, **Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melawan Hukum**, (Jakarta:Mahkamah Agung, 2003), hlm.21.



Sehingga dengan demikian, hakim berwenang untuk menentukan berapa sepantasnya harus dibayar ganti kerugian tersebut, sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas.

Pertanggung jawaban hukum tergugat kepada penggugat oleh karena perbuatan melawan hukum tidak diatur didalam Undang-Undang, maka menurut majelis hakim, yang digunakan untuk menentukan ganti rugi mengikuti pemberian ganti rugi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Yakni seperti yang diatur pasal 1243 sampai 1252 KUHPerdota.

Dari ketentuan pasal 1243 sampai pasal 1252 KUHPerdota, dapat ditarik kesimpulan bahwa ganti rugi tersebut merupakan suatu sanksi yang dapat dibebankan, berupa biaya yang harus dikeluarkan, kerugian yang dialami dan keuntungan yang diharapkan. Disamping kerugian yang tidak diperoleh penggugat sesuai keuntungan yang diharapkan. Penggugat juga telah mengeluarkan biaya-biaya untuk mengklarifikasi permasalahan yang dialami penggugat, dan juga biaya pengacara sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat.

Majelis hakim mempertimbangkan keadaan atau status sosial ekonomi dan martabat penggugat sebagai seorang pengusaha *mebeler*, meja, kursi, kusen dan sebagainya, dalam suatu usaha yang diberi nama UD. Anugerah, majelis hakim berpendapat bahwa sudah pantas apabila kemudian tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pemulihan nama baiknya, sebagai pengganti keuntungan yang diharapkan dan

sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan oleh penggugat untuk mengurus masalahnya dengan tergugat.

Sehingga, gugatan penggugat pada petitum angka kelima dan keenam disatukan menjadi satu oleh majelis hakim dan tergugat memiliki kewajiban untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pertimbangan hakim mengenai penjatuhan ganti kerugian bagi tergugat tersebut memang tidak sesuai dengan keinginan dari penggugat, karena menurut hakim jumlah kerugian yang dimohonkan oleh penggugat dalam tataran tidak layak, sehingga hakim perlu mempertimbangkan secara sosiologis mengenai status sosial ekonomi dan martabat dari penggugat sebagai pengusaha *meubel*.

Majelis hakim menjatuhkan tanggung jawab hukum bagi tergugat untuk membayar sejumlah ganti rugi. Namun, mengenai gugatan penggugat mengenai sita jaminan atau *conservatoir beslaag* terhadap tanah berikut bangunan milik tergugat (PT.Bank Mandiri Tbk) cabang di Jln.Brigjend Slamet Riyadi nomor 249 Surakarta ditolak oleh majelis hakim. Atau dengan kata lain, penggugat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap tanah berikut bangunan milik tergugat hal tersebut dikarenakan tidak adanya alasan hukum yang sah bagi penggugat untuk melakukan hal tersebut sehingga hakim tidak dapat mengabulkan gugatan mengenai hal tersebut.

Dalam Tingkat banding, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta dan pada tingkat Kasasi, majelis hakim menolak permohonan kasasi dari tergugat, sehingga mengakibatkan

tergugat memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim tersebut.

## **2. Tanggung jawab Bank berdasarkan Pasal 29 ayat (4) UU.No10 Tahun 1998 tentang Perbankan**

Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Pada dasarnya suatu Bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan menyebabkan kerugian bagi debitur atau nasabah baik karena sengaja atau karena kelalaian.<sup>141</sup> Bank yang melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi debitur atau nasabah berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 wajib bertanggung jawab untuk kepentingan nasabah yang dirugikan tersebut.<sup>142</sup> Pengaturan mengenai bagaimana akibat hukum dari kelalaian tersebut dipertanggung jawabkan dapat dibedakan yaitu pertanggungjawaban oleh bank dan pertanggungjawaban oleh pegawai bank sebagai pelaksana dari Sistem Informasi Keuangan.

---

<sup>141</sup>Risa Ayuta Naomi, dkk, “**Tanggung Jawab Bank terhadap nasabah dalam penyalahgunaan deposito untuk investasi (studi kasus bank btpn cabang bsd tangerang)**”, (Jurnal Hukum Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2, 2016), hlm. 36.

<sup>142</sup>Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998.

### **3. Tanggung Jawab Bank berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013**

Sementara di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengenai pertanggung jawaban pelaku jasa keuangan diatur didalam Pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut :

“pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggungjawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”<sup>143</sup>

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa, peraturan perundang-undangan yang lebih khusus yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme mengenai ganti kerugian bagi pihak konsumen pengguna jasa keuangan atas kerugian yang dideritanya, dan hanya menjelaskan mengenai kewajiban bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk melakukan pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Bagi penjatuhan ganti kerugian mengacu kepada peraturan yang tingkatannya lebih tinggi, yaitu berpedoman kepada KUHPdata khususnya pasal yang mengatur mengenai ganti kerugian.

---

<sup>143</sup>Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015 adalah telah sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1365 KUHPdata tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Mengenai ganti rugi akibat melawan hukum menurut pertimbangan hakim tidak dapat disamakan dengan ganti rugi akibat wanprestasi. Perbuatan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo Sriwedari secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 1365. Bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat baik secara *materiil* maupun *immateriil*. Akibat dari penolakan kasasi oleh majelis hakim mahkamah agung tersebut membuat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo Sriwedari wajib melaksanakan putusan hakim yang memerintahkan untuk membayar sejumlah ganti kerugian kepada termohon kasasi.

2. Tanggung jawab hukum yang dilakukan Bank Mandiri (Persero) Tbk, kantor cabang Solo, Sriwedari akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepada nasabah nya Tuan Sutrisno yaitu tanggung jawab berdasarkan KUHPdata, berupa ganti kerugian yang mengacu kepada pasal 1365 KUHPdata yaitu pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang. Majelis hakim mempertimbangkan keadaan atau status sosial ekonomi dan martabat penggugat

sebagai seorang pengusaha *mebeler*, meja, kursi, kusen dan sebagainya, dalam suatu usaha yang diberi nama UD. Anugerah, majelis hakim berpendapat bahwa sudah pantas apabila kemudian tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pemulihan nama baiknya, sebagai pengganti keuntungan yang diharapkan dan sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan oleh penggugat untuk mengurus masalahnya dengan tergugat.

## **B. Saran**

Berikut ini adalah saran-saran yang dapat disampaikan, yaitu :

### **1. Bagi Pemerintah**

Diharapkan pemerintah Indonesia segera memperbarui Undang-Undang Perbankan dan memasukkan pengaturan mengenai tanggung jawab hukum bank. Jika bank melakukan kesalahan dalam penjatuhan daftar hitam kepada nasabah agar hak-hak dari nasabah dapat terlindungi.

### **2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan**

Perlu adanya transparansi kerjasama dalam hal penyampaian informasi keuangan debitur yang dilakukan antara Bank maupun Lembaga Penyedia Jasa Keuangan dengan Otoritas Jasa Keuangan yang sekarang bertindak sebagai otoritas yang menerima laporan informasi keuangan debitur menggantikan Bank Indonesia.

### 3. Bagi Perbankan

Diharapkan untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan pelaporan informasi keuangan nasabah agar tidak ada lagi kasus kesalahan dalam penjatuhan daftar hitam kepada nasabah.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A.Abdurrachman, **Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan**, (Jakarta: Pradnya Paramita,2003).
- Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum**, Edisi Kedua, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011).
- Ahmad Rifai, **Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Alfitra, **Modus Operandi Pidana Khusus di luar KUHP (Korupsi, Money Laundering & Trafficking**, (Jakarta : Penebar Swadaya Grup , 2014).
- Beny Rahman, **Pertanggungjawaban bank terhadap kerugian nasabah yang terkait dengan fasilitas transaksi melalui sms banking**, (Jakarta: Publikasi Ilmiah, 2008).
- Chaidir Ali, **Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melawan Hukum**, (Jakarta:Mahkamah Agung, 2003).
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, **Hukum Perlindungan Konsumen**, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008).
- Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa**, Edisi Keempat, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Djazuli Bachar, **Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum**, edisi revisi, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004).
- Etty Mulyati, **Kredit Perbankan**, (Bandung:PT Refika Aditama, 2016).
- H.A.S.Moenir, **Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia**, (Jakarta:Bumi Aksara, 2010).
- Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Cetakan Ke 6, (Jakarta:Kencana,2011).
- Hilman Hadi Kusuma, **Bahasa Hukum Indonesia**, (Bandung: Alumni, 2003).
- Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Cetakan Keempat,(Jakarta:Banyumedia,2008).

- Kasmir, **Analisis Laporan Keuangan**, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).
- Kasmir, **Dasar-Dasar Perbankan**, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).
- Kuncoro, Mundrajad, dkk., **Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi**, (Yogyakarta & Makassar: BPFE, 2002).
- M. Yahya Harahap, **Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata**, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).
- Mahesa Jati Kusuma, **Hukum Perlindungan Nasabah Bank**, (Bandung: Nusa Media, 2012).
- Modul Workshop, **Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen**, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015).
- Moegni Djojodirjo, **Perbuatan Melawan Hukum**, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001).
- MunirFuady, **Hukum Perbankan Modern**, (Bandung: PT CitraAdityaBakti 2001).
- Munir Fuady, **Dinamika Teori Hukum**, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007).
- Nindyo Pramono, **Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual**, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- R. Soeroso, **Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara dan Proses Persidangan)**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Retnowulan Susanto dan Iskandar Oeripkartawinata, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek**, (Bandung: Mandar Maju, 2001).
- Rosa Agustina, **Perbuatan Melawan Hukum**, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).
- Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).
- Sentosa Sembiring, **Hukum Perbankan**, edisi Revisi, (Bandung: Mandar Maju, 2012).
- Shindarta, **Hukum Perlindungan Konsumen**, (Jakarta: Grasindo, 2000).

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, (Jakarta:Rajawali,2008).
- Soetanto Hadinoto, **Bank Strategi on Funding and Liability Management**, (Jakarta:Gramedia, 2008).
- Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000).
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenai Hukum Suatu Pengantar**, (Yogyakarta: Liberty, 2001).
- Suheimi, **Kejahatan Komputer**, (Jakarta:Andi Offset, 2001).
- Sukarmi, **Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang Bayang Pelaku Usaha**, (Jakarta: Pustaka Sutra, 2004).
- Sunaryo, **Hukum Lembaga Pembiayaan**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, edisi kedua, cet 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Titik Triwulan Tutik, **Hukum Perdata dalam sistem hukum nasional**, (Jakarta:Kencana, 2015).
- Tri Widiyono, **Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, simpanan, jasa dan Kredit**, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2006).
- Wahyu Sasongko, **Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen**,(Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2007).
- Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Perdata tentang Perjanjian-Perjanjian Tertentu**, (Bandung:Mandar Maju, 2000).

## JURNAL

- Anggita Maynanda Pratiwi, **“Perlindungan Hukum terhadap nasabah debitur yang terlapor dalam sistem informasi debitur (sid) Bank Indonesia”**,(Jurnal Hukum Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, 2016).
- Aprilya Altji Papendang, **“Hak dan kewajiban nasabah bank serta perlindungan hukum menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998”**,(Jurnal Lex Administratum Vol 4 No.3, 2016).
- Bambang Sugeng Ariadi S,dkk., **“Kajian Penerapan Asas Ultra Petita pada Petitum ex aequo et bono”**, (Jurnal Hukum Yuridika Volume 29 No.1 edisi Januari-April 2014).

- Bambang Suprayitno, **“Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah dan Bank Serta Konsepsi Ke Depanannya”**, (Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 5, Nomor 2, Desember, 2008).
- David Y. Wonok, **“Perlindungan hukum atas hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa bank terhadap risiko yang timbul dalam penyimpanan dana”**, (Jurnal Ilmu Hukum Vol.1/No.2/April-Juni/Edisi Khusus, 2013).
- Elli Ruslina, **“Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia”**, (Jurnal konstitusi volume 9, nomor 1, Maret 2012).
- Fatmah Paparang, **“Kegiatan Bank dalam penghimpunan dana masyarakat”**, (Jurnal Ilmu Hukum Vol III No.9, 2016).
- Fransisca Claudya Mewoh, dkk., **“Analisis Kredit Macet”**, (Jurnal Administrasi Bisnis, Jakarta, 2012).
- Gadug Kurniawan, **“Kebebasan Sebagai Hakikat Demokrasi”**, (Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor 1, Januari 2015).
- John Bert Christian, dkk, **“Analisis hukum atas penerapan rahasia bank di Indonesia terkait dengan perlindungan data nasabah berdasarkan prinsip kepercayaan kepada bank (studi pada bank cimb niaga tbk. cabang Medan)”**, (USU Law Journal, Vol 4 No.4, 2016).
- Joice Irma Runtu Thomas, **“Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah yang dirugikan dalam pembobolan rekening nasabah”**, (Jurnal Hukum Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013).
- Julista Mustamu, **“Pertanggung jawaban hukum pemerintah (kajian tentang ruang lingkup dan hubungan diskresi)”**, (Jurnal Sasi vol.20 No.2 bulan Juli-Desember, 2014).
- Komang Juniawan, **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan kartu ATM Pada Bank Swasta Nasional di Denpasar”**, (Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 3 Nomor 2, 2013).
- Mauritz Pray Takasenseran, **“Perjanjian antara Bank dan Nasabah menurut undang-undang No.10 Tahun 1998”**, (Jurnal Lex et societatis vol. IV/No 7/Juli, 2016).
- Mohammad Wisno Hamin, **“Perlindungan hukum bagi nasabah (debitur) bank sebagai konsumen pengguna jasa bank terhadap risiko dalam perjanjian kredit bank”**, (Jurnal Hukum Lex Crimen vol. VI/No.1/Jan-Feb, 2017).

- Nanci Mamarimbing, **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)”**,(Jurnal Hukum Lex Crimen vol VI/No.3, Mei 2017).
- Noor Hafidah, **“Sekilas tentang risiko dan penyelesaian hukum terhadap kredit macet”**,(Jurnal Hukum No.19, Vol 9 Februari, 2002).
- Nurul Fitria,dkk., **“Analisis kebijakan pemberian kredit dan pengaruh non performing loan terhadap loan to deposit ratio pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang rantau, Aceh Tamiang periode 2007-2011”**,(Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.1, No.1, 2012).
- Nur Iftitah Isnantiana, **“Legal reasoning hakim dalam pengambilan keputusan perkara di pengadilan”**,(Jurnal Hukum Islamadina Volume 18, No.2, Juni 2017).
- Thesa Febrina Aziza, **“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Kesalahan Pada Sistem Informasi Debitur (SID)”**(Jurnal Ilmiah, FH UB, 2015).
- Renzie A.C.U, dkk.,**“Tanggung Jawab Bank dalam Penerbitan Kartu Kredit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 84/Pdt G/2014/PN.Skt)”**,(Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, 2017).
- Rifka Regar, dkk, **“Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah (Studi Pada PT.Bank Sulutgo cabang Manado)”**, Jurnal Administrasi Bisnis, 2016.
- Risa Ayuta Naomi,dkk.,**“Tanggung Jawab Bank terhadap nasabah dalam penyalahgunaan deposito untuk investasi (studi kasus bank btpn cabang bsd tangerang)”**,(Jurnal Hukum Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2, 2016).
- Sarah D.L.Roeroe, **“Aspek hukum penggunaan surat berharga pada dunia perbankan bagi masyarakat Indonesia”**, (Jurnal Hukum Unsrat Vol.22/No.7/Agustus, 2016).
- Sri Redjeki Slamet, **“Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi”**,(Jurnal Hukum Lex Jurnalica, volume 10 nomor 2, Agustus 2013).
- Sumadi, **“Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari’ah”**,(Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Nomor 3, 2017).
- Yunus Husein, **“Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering”**,(Jurnal Hukum Bisnis, 16 November 2001).



## **MAKALAH DAN MEDIA MASSA**

**Pedoman Penyusunan Laporan Debitur V6. 1-20170119.**

**Pedoman Penyusunan Laporan Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan** Versi 6-16 januari 2017.

Supriyanta, **“Realisme Hukum dan Kritiknya terhadap Positivisme Hukum”**, (Makalah Dinamika Hukum, 2011).

Ziaurrani Mahendra, **“Pertimbangan dan faktor penyebab hakim mengabulkan permohonan dispensasi umur perkawinan (Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)”**, (Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2014).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

**Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).**

**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No.42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

**Undang-Undang Nomor.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia**, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357).

**Undang-Undang Nomor.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

**Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Sistem Informasi Debitur** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4784).

**Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan** (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5431).

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.**

#### **PUBLIKASI INTERNET**

Nindita Citra Utami, “**Kesalahan Dalam Informasi Sistem Informasi Debitur Dalam Pemberian Kredit Dikaitkan Dengan Manajemen Risiko Sebagai Penetapan Prinsip Kehati-hatian**”. Diakses dari: <http://fh.unpad.ac.id/repo/2013/01/kesalahan-dalam-Informasi-sistem-informasi-debitur-dalam-pemberian-kredit-dikaitkan-dengan-manajemen-risiko-sebagai-penetapan-prinsip-kehati-hatian-bank/> pada tanggal 01 April 2018.

[www.miftakhulhuda.com](http://www.miftakhulhuda.com), diakses pada tanggal 18 April 2018, pukul 20.00 WIB

[www.ninyasminelisasih.com](http://www.ninyasminelisasih.com), diakses pada tanggal 21 Maret 2018, Pukul 17.00 WIB.

[www.perpustakaanmahkamahagung.go.id](http://www.perpustakaanmahkamahagung.go.id), diakses pada tanggal 21 Maret 2018, pukul 16.00 WIB.

[www.pressreader.com](http://www.pressreader.com), diakses pada tanggal 20 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB.

[www.safaat.lecture.ub.ac.id](http://www.safaat.lecture.ub.ac.id), diakses pada tanggal 21 Maret 2018, Pukul 17.00 WIB.

[www.sikapiuangmu.ojk.go.id](http://www.sikapiuangmu.ojk.go.id), diakses pada tanggal 19 Maret 2018 Pukul 12.00 WIB.



**TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK TERHADAP NASABAH YANG  
TERKENA DAFTAR HITAM AKIBAT KESALAHAN BANK  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015)**

**JURNAL**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam  
Ilmu Hukum

Oleh :

**SAFIRA AMALIA SANI  
NIM. 155010112111001**



**KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK  
TERHADAP NASABAH YANG TERKENA  
DAFTAR HITAM AKIBAT KESALAHAN BANK  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527  
K/Pdt/2015)**

**Identitas Penulis** :

**a. Nama** : **SAFIRA AMALIA SANI**

**b. NIM** : **155010112111001**

**Konsentrasi** : **Hukum Perdata Bisnis**

**Jangka waktu penelitian** : **6 Bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Sihabudin, S.H.,M.H.

Dr. Reka Dewantara, S.H.,M.H.

NIP. 195912161985031001

NIP. 198305022008121003

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, S.H.,LLM.

NIP. 197206222005011002

## **TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK TERHADAP NASABAH YANG TERKENA DAFTAR HITAM AKIBAT KESALAHAN BANK**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015)**

**Safira Amalia Sani, Dr. Sihabudin, SH.,M.H., Dr. Reka Dewantara,  
SH.,M.H.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [safirapersie@gmail.com](mailto:safirapersie@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum bank terhadap nasabah yang terkena daftar hitam akibat kesalahan bank. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015, perbuatan bank yang melakukan kesalahan penjatuhan daftar hitam perbankan kepada nasabah nya termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Solo Sriwedari diwajibkan melakukan tanggung jawab hukum atas kelalaian yang telah dilakukan oleh pihak nya karena dalam persidangan telah terbukti melakukan kesalahan dalam hal pelaporan daftar hitam perbankan. Namun, dalam perkara kesalahan bank dalam penjatuhan daftar hitam perbankan belum ada pengaturan mengenai tanggung jawab hukum bank jika bank melakukan kesalahan dalam penjatuhan daftar hitam kepada nasabah serta pengaturan yang mengatur mengenai berapa besarnya dan bagaimana pemenuhan ganti kerugian yang harus dipenuhi oleh bank kepada nasabahnya yang mengalami kerugian. Sehingga majelis hakim sebagai lembaga yang memiliki kewenangan diharapkan dapat memutus berapa besarnya ganti kerugian yang dibebankan kepada pihak bank yang terbukti bersalah dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan, bukti-bukti dan keterangan saksi. Sehingga putusan majelis hakim dapat mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara dan bagi masyarakat luas. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 84/Pdt G/2014/PN Skt diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 424/Pdt/2014/PT.SMG dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015, Majelis Hakim memutus besarnya ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum terkait kesalahan dalam penjatuhan daftar hitam perbankan yang dilakukan Oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Solo Sriwedari adalah berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang dengan mempertimbangkan keadaan atau status sosial ekonomi dan martabat penggugat sebagai seorang pengusaha mikro, kecil dan menengah

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab Hukum, Daftar Hitam, Nasabah, Kesalahan Bank



## **TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK TERHADAP NASABAH YANG TERKENA DAFTAR HITAM AKIBAT KESALAHAN BANK**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015)**

**Safira Amalia Sani, Dr. Sihabudin, SH.,M.H., Dr. Reka Dewantara,  
SH.,M.H.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [safirapersie@gmail.com](mailto:safirapersie@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This research aims to determine the legal liability of banks against customers who are blacklisted due to bank errors. Based on Decision of the Supreme Court Number 1527 K / Pdt / 2015, the actions of the bank that made the mistake of blacklisting the banking to its customers are included in the act against the law. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Solo Branch Sriwedari is required to take legal responsibility for the negligence that has been done by his party because in the trial has been proven to make mistakes in terms of reporting the banking blacklist. However, in the case of bank errors in the blacklisting of banks there is no regulation regarding the legal liability of the bank if the bank made a mistake in blacklisting the customer and the regulation governing how much and how the fulfillment of compensation must be met by the bank to its customers who experienced so that the panel of judges as an institution with the authority is expected to decide how much compensation is charged to the bank that is found guilty by considering matters relating to the facts in the hearing, evidence and statements of witnesses. The decision of the District Court of Surakarta Number 84 / Pdt G / 2014 / PN Skt is reinforced by the Decision of the High Court of Semarang Number 424 / Pdt / 2014 / PT.SMG and Decision of Supreme Court Supreme Court Number 1527 K / Pdt / 2015, the Panel of Judges decided the amount of compensation due to illegal acts related to errors in banking blacklisting conducted by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Solo Sriwedari Branch is based on Article 1365 Burgelijk Wetboek, compensation payments in the form of money by considering the circumstances or socioeconomic status and the plaintiff's dignity as a micro, small and medium entrepreneur.*

**Keywords :** Legal Responsibility, Blacklist, Customer, Bank Error

## PENDAHULUAN

Lembaga perbankan termasuk kedalam salah satu lembaga penyedia jasa keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian negara Indonesia. Lembaga perbankan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu perbankan mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Hubungan antara bank dan nasabah termasuk kedalam hubungan kontraktual antara pihak debitur dan kreditur yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian, dengan tujuan supaya bank yang menggunakan uang debitur tersebut akan membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila di tagih oleh penyimpannya. Demikian pula dengan hubungan antara bank dan nasabah yang berperan sebagai pihak debitur termasuk ke dalam hubungan kepercayaan. Hal ini dikatakan demikian karena bank hanya bersedia memberikan kredit kepada debitur atas kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kreditnya tersebut.<sup>144</sup> Sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa,

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.<sup>145</sup>

Adapun rangkaian dari prinsip kehati-hatian adalah diantaranya Prinsip mengenal Nasabah (*Knows Your Customers Principle*).<sup>146</sup>

---

<sup>144</sup> Etty Mulyati, **Kredit Perbankan**, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016) , hlm. 69

<sup>145</sup> Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>146</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan/jk/Documents/Pages/POJ-K-tentang-Pelaporan-dan-Permintaan-Informasi-Debitur-melalui-Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 19.00



Bank Indonesia, sebelumnya merupakan sebuah otoritas yang memegang kewenangan dalam pengelolaan sistem informasi nasabah untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan, Namun setelah diundangkannya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur, pada bulan April tahun 2017 kewenangan dalam melakukan pengelolaan sistem informasi nasabah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Hal tersebut mengakibatkan peraturan yang lama yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sistem Layanan Informasi Keuangan memuat Laporan keuangan Debitur menggantikan Sistem Informasi Debitur. Menurut Pasal 4 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Laporan Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan, Laporan Debitur mencakup mengenai informasi mengenai debitur, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin, pengurus dan pemilik dan keuangan debitur itu sendiri yang menjadi pokoknya.<sup>147</sup> Laporan Debitur sebagaimana yang dimaksud wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan<sup>148</sup>, yang mana menurut pasal 10 disebutkan bahwa

“pelapor yang akan menyampaikan laporan debitur dan/atau koreksi laporan debitur hanya dapat menyampaikan laporan dan/atau koreksi

---

<sup>147</sup> Pasal 4 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Laporan Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

<sup>148</sup> Pasal 4 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Laporan Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.



laporan debitur tersebut melalui sebuah mekanisme secara *online* melalui SLIK.”<sup>149</sup>

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) merupakan suatu bentuk peraturan baru yang merupakan perluasan dari Sistem Informasi Debitur yang dahulu nya merupakan kewenangan dari Bank Indonesia. SLIK dibangun agar menjadi sarana pertukaran informasi pembiayaan atau perkreditan antar lembaga di bidang keuangan dan bertujuan membantu menurunkan tingkat resiko kredit bermasalah, karena SLIK merupakan inovasi yang dilakukan oleh OJK seiring dengan perkembangan yang terdapat dalam industri jasa keuangan.

Terdapat penambahan bagi pihak pelapor Informasi Debitur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016, pihak pelapor sebelumnya tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Pembiayaan dengan aset dibawah 10 miliar rupiah serta Lembaga Penyedia Jasa Keuangan yang lain, namun di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017, pelapor menurut Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 adalah Bank Umum, BPR, BPRS, Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan fasilitas penyediaan dana kecuali lembaga keuangan mikro, sehingga dapat diketahui bahwa pada peraturan OJK yang baru tersebut memperluas pihak pelapor.<sup>150</sup>

Peraturan perluasan dari Sistem Informasi Debitur yang bernama Sistem Layanan Informasi Keuangan merupakan upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mencegah terjadinya kredit macet, kedepannya dapat berfungsi dengan efektif bila dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Tetapi dalam praktik nya, terkait pelaporan informasi keuangan debitur, bank yang telah

---

<sup>149</sup> Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Laporan Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

<sup>150</sup> Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Laporan Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.

memberikan pembiayaan atau kredit kepada debitur ketika melaksanakan pelaporan perihal pelunasan debitur melakukan kesalahan atau kelalaian maupun tidak sama sekali melaporkan mengenai pelunasan tersebut. Sehingga terjadi perbedaan laporan riwayat kredit nasabah pada bank yang memberikan kredit dengan sistem informasi debitur yang ada pada Bank Indonesia yang mengakibatkan nasabah masuk dalam kategori kredit macet sehingga didaftar hitamkan atau *blacklist*. Dalam kamus istilah populer perbankan Bank Indonesia, *blacklist* atau daftar hitam adalah daftar nama para nasabah individu atau badan hukum maupun perusahaan yang terkena sanksi dari bank karena telah melakukan beberapa tindakan tertentu yang bisa merugikan pihak Bank dan masyarakat.

Kasus mengenai kesalahan Bank dalam menjatuhkan daftar hitam kepada nasabah nya terjadi kepada Sutrisno dengan P.T Bank Mandiri cabang Kota Solo, Sriwedari. Dalam kasus tersebut, Sutrisno yang merupakan seorang pelaku usaha mikro bertindak selaku penggugat dan P.T Bank Mandiri cabang Kota Solo, Sriwedari sebagai pihak tergugat. Pihak penggugat melakukan gugatan kepada Pengadilan karena tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa memasukkan penggugat ke dalam daftar hitam Bank Indonesia dengan dalih bahwa penggugat memiliki tunggakan hutang kartu kredit padahal penggugat sama sekali tidak pernah menggunakan fasilitas kartu kredit tersebut yang akibat perbuatan tergugat tersebut membawa kerugian bagi penggugat karena akhirnya penggugat tidak dapat mengajukan kredit sebagai modal usaha nya.

Penggugat melayangkan gugatan kepada Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 22 April 2014 karena sebelumnya sudah melakukan penyelesaian masalah dengan pihak tergugat baik secara lisan maupun tertulis sebanyak 3 kali, namun tidak ada itikad baik dari pihak tergugat untuk menyelesaikan permasalahan. Penggugat telah dirugikan kepentingan secara materiil dikarenakan permohonan fasilitas kredit modal usaha telah ditolak oleh lembaga keuangan antara lain PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) UlaMM Wonogiri, PT. Bank Bukopin cabang pembantu 31-Primkopti Wonogiri, PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk cabang Wonogiri. Hal tersebut dikarenakan penggugat telah

masuk ke dalam Daftar Hitam (*blacklist*) Oleh Bank Indonesia melalui surat No. 16/570/DPKL/Slo tanggal 26 Maret 2014, dimana dalam lembar informasi debitur menyebutkan penggugat mempunyai tunggakan kartu kredit dari tergugat senilai 8 juta rupiah.

Pada kasus tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta mengeluarkan amar putusan yang antara lain menerangkan bahwa tergugat yaitu Bank Mandiri cabang Kota Solo, Sriwedari telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan bahwa Surat Tagihan (*invoice*) tertanggal 06 Maret 2013 adalah batal demi hukum dan cacat formil, dan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar seratus juta rupiah.

POJK Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Undang-Undang Perbankan yang mengatur mengenai Perlindungan terhadap debitur dapat memberikan pandangan terhadap para debitur bahwa segala hak-hak perbankan debitur diatur dan dilindungi oleh undang-undang sehingga bila suatu hari terjadi sengketa diantara debitur dan Bank maka tidak akan ragu dan takut untuk melaporkan kerugian yang di alami oleh debitur dan menuntut pihak bank atau Lembaga keuangan lain yang menyediakan fasilitas penyediaan dana yang terkait.<sup>151</sup>

Konsep ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk kepada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam penerapan konsepsi perbuatan melawan hukum seringkali dipersamakan dengan konsepsi perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi* padahal keduanya merupakan konsepsi yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian *immateriil* diserahkan kepada hakim dengan prinsip *ex aquo et bono*. Hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian *immateriil* yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas hakim yang memutus perkara.

---

<sup>151</sup> Pedoman-penyusunan laporan debitur melalui system layanan informasi keuangan versi 6-16 januari 2017, diakses pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 17.00

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap nasabah yang terkena daftar hitam akibat kesalahan bank pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015 dan tanggung jawab hukum bank bagi nasabah yang terkena daftar hitam akibat kesalahan bank

## PEMBAHASAN

### 1. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan perlindungan hukum bagi debitur yang terkena daftar hitam akibat kesalahan bank, bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku teks, jurnal-jurnal hukum, sedangkan bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui perpustakaan. Teknik penelusuran bahan hukum berupa penelusuran bahan hukum primer melalui peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan, dan bahan hukum tersier melalui kamus cetak maupun kamus *online* yang tersedia di situs-situs internet.

### 2. Hasil Penelitian

#### A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1527 K/Pdt/2015

BAB IX Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 24 dan Pasal 25 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas, serta penjelasan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yaitu:

“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”<sup>152</sup>

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Maka kekuasaan ini harus terbebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan yudisial. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat. Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 menegaskan bahwa

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”<sup>153</sup>

Seorang hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, hal ini menjadi ciri suatu negara hukum.<sup>154</sup>

Seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Istilah tidak memihak ini diartikan tidak harfiah, tidak memihak dalam pengertian tersebut artinya hakim tidak dibenarkan untuk memilih klien yang akan dibela karena dalam menjatuhkan putusannya harus memihak kepada kebenaran. Tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Dinyatakan dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 pasal 5 ayat (1) bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap suatu perkara, entah itu putusan perdata atau yang lain, hakim harus benar-benar

---

<sup>152</sup> Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>153</sup> Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>154</sup> Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, (Jakarta: Sinar Grafika 2002), hlm.

menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi kewenangannya, masing-masing kearah tegaknya hukum itu sendiri yakni, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur suatu perbuatan. Apakah perbuatan dari tergugat tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan unsur yang ada dalam pasal sehingga pertimbangan hakim akan relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>155</sup>

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori, yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan. Misalnya, keterangan tergugat, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum perdata. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang tergugat, kondisi tergugat, dll.<sup>156</sup>

Selain pertimbangan yuridis, dari perkara yang diajukan oleh penggugat, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Skt mempertimbangkan fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan yaitu mengenai bukti surat dan kesaksian dari para saksi. Pertimbangan majelis hakim tersebut pertimbangan yang bersifat

---

<sup>155</sup> Lilik Mulyadi, **Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya**, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 193

<sup>156</sup> Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2007, hlm. 212



yuridis. Lalu, pertimbangan non-yuridis hakim dalam penjatuhan jumlah ganti kerugian bagi tergugat, hakim mempertimbangkan mengenai status hukum penggugat yang merupakan seorang pengusaha mikro kecil dan menengah, sehingga ganti kerugian yang dibebankan kepada tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dirasa oleh hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak.

Pada tingkat Pengadilan Tinggi, majelis hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Surakarta Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Skt karena berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis, banding yang diajukan oleh pembanding dahulu tergugat ditolak karena tidak berdasarkan oleh hukum, mengada-ada dan tidak ada relevansi nya dengan pembanding atau dahulu tergugat.

Pada tingkat kasasi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkara karena dalam pemeriksaan kasasi perkara tidak menjadi “mentah” lagi, sehingga mengenai faktanya sudah tidak dapat ditinjau lagi oleh majelis hakim. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi hanya meneliti soal penerapan hukumnya saja, yaitu apakah Putusan Pengadilan yang di mohonkan kasasi itu “melanggar hukum” atau “tidak melanggar hukum”

Majelis hakim Mahkamah Agung menolak kasasi oleh pemohon kasasi karena menurut majelis hakim, putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 424/Pdt/2014/PT.SMG dalam perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang seperti yang telah dimohonkan kasasi oleh pemohon kasasi, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut harus ditolak dan berimplikasi pihak yang dinyatakan bersalah wajib melakukan tanggung jawab hukum berupa membayar sejumlah ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.



Setelah putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015 dibacakan, maka putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai implikasi yuridis atau akibat terhadap pihak yang bersengketa. Akibat dari putusan tersebut adalah, pihak yang kalah harus mau melaksanakan isi putusan dengan sukarela. Dalam hal ini, pihak yang kalah adalah tergugat yaitu PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari. Apabila pihak tergugat tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri, maka dapat melakukan upaya hukum

Setelah semua upaya hukum ditempuh, akhirnya putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Akibatnya terhadap putusan tersebut adalah pihak yang kalah harus melaksanakan putusan dengan sukarela. Dengan demikian selesailah perkara. Akan tetapi apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka dapat dilakukan pelaksanaan putusan secara paksa (eksekusi) oleh Pengadilan. Pelaksanaan putusan hakim dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 2004, 195 ayat (1), 197 ayat (2) HIR, 206 ayat (1), 209 ayat (1) Rbg).<sup>157</sup>

Tujuan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015 tentang penjatuhan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah dapat dianalisis melalui penelusuran dan pemahaman isi teks putusan tersebut. Dalam memahami secara utuh tujuan putusan tersebut, perlu dikaitkan dengan teori mengenai tujuan hukum. Terdapat beberapa pemikiran mengenai tujuan hukum. Achmad Ali membedakannya menjadi dua kelompok, yaitu ajaran konvensional dan ajaran modern. Ajaran konvensional terdiri dari paham-paham ekstrem antara lain ajaran etis yang menyatakan tujuan hukum semata-mata untuk mencapai keadilan, ajaran utilitis yang menyatakan tujuan

---

<sup>157</sup> Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000), hlm.347.

hukum semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan sebesar-besarnya, dan ajaran normatif-dokmatif yang menyatakan tujuan hukum semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Berbeda dengan ajaran konvensional yang condong pada satu aspek, ajaran modern memiliki pemahaman-pemahaman yang menerima keadilan, kemanfaatan, dan kepastian sebagai tujuan hukum, namun dengan prioritas tertentu, yang kemudian melahirkan ajaran prioritas baku dan ajaran prioritas kasuistik.<sup>158</sup>

### **B. Tanggung Jawab Hukum Bank Terhadap Nasabah Yang Terkena Daftar Hitam Akibat Kesalahan Bank**

Bank Umum yang melakukan kelalaian dalam hal pelaporan sebagaimana diatur dalam Sistem Informasi Keuangan dianggap telah melanggar pasal 1365 KUHPdata karena menimbulkan kerugian kepada nasabah debitur yang bersangkutan. Oleh karena itu terhadap bank umum yang telah lalai tersebut dituntut suatu ganti kerugian. Hal ini berlaku juga bagi pegawai bank yang melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian pada nasabah.

Pasal 1365 KUHPdata mengatur bahwa, “setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut memberikan ganti kerugian.”<sup>159</sup> Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan bank. Maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Pasal 1365 KUHPdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan yakni antara lain :

---

<sup>158</sup> Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum**, Edisi Kedua, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.59

<sup>159</sup> Pasal 1365 KUHPdata

- g. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang
- h. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula
- i. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
- j. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
- k. Meniadakan sesuatu yang diadakann secara melawan hukum
- l. Pengumuman daripada keputusan atau d ari sesuatu yang telah diperbaiki

Oleh karena itu Bank atau pegawai bank yang telah menimbulkan kerugian kepada nasabahnya wajib memberikan ganti rugi karena selain telah memberikan informasi yang tidak benar sehingga nasabah tersebut dirugikan karena tidak dapat meminjam kredit dari bank lain juga merupakan pencemaran nama baik.

Dengan terpenuhinya kelima unsur secara kumulatif yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, maka Bank Mandiri dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan dengan demikian, Bank Mandiri harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya.

Dalam hal ini, hakim berwenang untuk menentukan berapa pantas atau sepantasnya harus membayar ganti kerugian tersebut, sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas. Mahkamah Agung Indonesia dalam putusannya R.Soegijono v. Walikota Kepada Daerah Tingkat II Kota Madya Blitar No.610/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1970, memuat pertimbangan antara lain sebagai berikut :<sup>160</sup>

“Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim

---

<sup>160</sup> Chaidir Ali, **Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melawan Hukum**, (Mahkamah Agung:Jakarta , 2003), hlm.21.

berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal 178 (3) HIR (*ex aequo et bono*).”

Sehingga dengan demikian, hakim berwenang untuk menentukan berapa sepantasnya harus dibayar ganti kerugian tersebut, sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas.

Pertanggung jawaban hukum tergugat kepada penggugat oleh karena perbuatan melawan hukum tidak diatur didalam Undang-Undang, maka menurut majelis hakim, yang digunakan untuk menentukan ganti rugi mengikuti pemberian ganti rugi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan. Yakni seperti yang diatur pasal 1243 sampai 1252 KUHPerdata.

Dari ketentuan pasal 1243 sampai pasal 1252 KUHPerdata, dapat ditarik kesimpulan bahwa ganti rugi tersebut merupakan suatu sanksi yang dapat dibebankan, berupa biaya yang harus dikeluarkan, kerugian yang dialami dan keuntungan yang diharapkan. Disamping kerugian yang tidak diperoleh penggugat sesuai keuntungan yang diharapkan. Penggugat juga telah mengeluarkan biaya-biaya untuk mengklarifikasi permasalahan yang dialami penggugat, dan juga biaya pengacara sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat.

Majelis hakim mempertimbangkan keadaan atau status sosial ekonomi dan martabat penggugat sebagai seorang pengusaha *mebeler*, meja, kursi, kusen dan sebagainya, dalam suatu usaha yang diberi nama UD. Anugerah, majelis hakim berpendapat bahwa sudah pantas apabila kemudian tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) sebagai pemulihan nama baiknya, sebagai pengganti keuntungan yang diharapkan dan sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan oleh penggugat untuk mengurus masalahnya dengan tergugat.

Sehingga, gugatan penggugat pada petitum angka kelima dan keenam disatukan menjadi satu oleh majelis hakim dan tergugat memiliki kewajiban untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pertimbangan hakim mengenai penjatuhan ganti kerugian bagi tergugat tersebut memang tidak sesuai dengan keinginan dari penggugat, karena menurut hakim jumlah kerugian yang dimohonkan oleh penggugat dalam tataran tidak layak, sehingga hakim perlu mempertimbangkan secara sosiologis mengenai status sosial ekonomi dan martabat dari penggugat sebagai pengusaha *meubel*.

Majelis hakim menjatuhkan tanggung jawab hukum bagi tergugat untuk membayar sejumlah ganti rugi. Namun, mengenai gugatan penggugat mengenai sita jaminan atau *conservatoir beslaag* terhadap tanah berikut bangunan milik tergugat (PT.Bank Mandiri Tbk) cabang di Jln.Brigjend Slamet Riyadi nomor 249 Surakarta ditolak oleh majelis hakim. Atau dengan kata lain, penggugat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap tanah berikut bangunan milik tergugat hal tersebut dikarenakan tidak adanya alasan hukum yang sah bagi peng gugat untuk melakukan hal tersebut sehingga hakim tidak dapat mengabulkan gugatan mengenai hal tersebut.

Dalam Tingkat banding, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta dan pada tingkat Kasasi, majelis hakim menolak permohonan kasasi dari tergugat, sehingga mengakibatkan tergugat memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim tersebut.

Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pada dasarnya suatu Bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan menyebabkan kerugian bagi

debitur atau nasabah baik karena sengaja atau karena kelalaian. Bank yang melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi debitur atau nasabah berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 wajib bertanggung jawab untuk kepentingan nasabah yang dirugikan tersebut.<sup>161</sup> Pengaturan mengenai bagaimana akibat hukum dari kelalaian tersebut dipertanggungjawabkan dapat dibedakan yaitu pertanggungjawaban oleh bank dan pertanggungjawaban oleh pegawai bank sebagai pelaksana dari Sistem Informasi Keuangan.

Sementara di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengenai pertanggungjawaban pelaku jasa keuangan diatur didalam Pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut :

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggungjawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa, peraturan perundang-undangan yang lebih khusus yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme mengenai ganti kerugian bagi pihak konsumen pengguna jasa keuangan atas kerugian yang dideritanya, dan hanya menjelaskan mengenai kewajiban bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk melakukan pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Bagi penjatuhan ganti kerugian mengacu kepada

---

<sup>161</sup> Pasal 29 ayat (4) E Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998



peraturan yang tingkatannya lebih tinggi, yaitu berpedoman kepada KUHPdata khususnya pasal yang mengatur mengenai ganti kerugian.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah penulis paparkan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1527 K/Pdt/2015 adalah telah sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1365 KUHPdata tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Mengenai ganti rugi akibat melawan hukum menurut pertimbangan hakim tidak dapat disamakan dengan ganti rugi akibat wanprestasi. Perbuatan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo Sriwedari secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 1365. Bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat baik secara *materiil* maupun *immateriil*. Akibat dari penolakan kasasi oleh majelis hakim mahkamah agung tersebut membuat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo Sriwedari wajib melaksanakan putusan hakim yang memerintahkan untuk membayar sejumlah ganti kerugian kepada termohon kasasi
2. Tanggung jawab hukum yang dilakukan Bank Mandiri (Persero) Tbk, kantor cabang Solo, Sriwedari akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan kepada nasabah nya Tuan Sutrisno yaitu tanggung jawab berdasarkan KUHPdata, berupa ganti kerugian yang mengacu kepada pasal 1365 KUHPdata yaitu pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang. Majelis hakim mempertimbangkan keadaan atau status sosial ekonomi dan martabat penggugat sebagai seorang pengusaha *mebeler*, meja, kursi, kusen dan sebagainya, dalam suatu usaha yang diberi nama UD. Anugerah, majelis hakim berpendapat bahwa sudah pantas apabila



kemudian tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) sebagai pemulihan nama baiknya, sebagai pengganti keuntungan yang diharapkan dan sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan oleh penggugat untuk mengurus masalahnya dengan tergugat.

Setelah melakukan penelitian ini, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Diharapkan pemerintah Indonesia segera memperbarui Undang-Undang Perbankan dan memasukkan pengaturan mengenai tanggung jawab hukum bank Jika bank melakukan kesalahan dalam penjatuhan daftar hitam kepada nasabah agar hak-hak dari nasabah dapat terlindungi.

2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Perlu adanya transparansi kerjasama dalam hal penyampaian informasi keuangan debitur yang dilakukan antara Bank maupun Lembaga Penyedia Jasa Keuangan dengan Otoritas Jasa Keuangan yang sekarang bertindak sebagai otoritas yang menerima laporan informasi keuangan debitur menggantikan Bank Indonesia.

3. Bagi Perbankan

Diharapkan untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam melakukan pelaporan informasi keuangan nasabah agar tidak ada lagi kasus kesalahan dalam penjatuhan daftar hitam kepada nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU:**

Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum**, Edisi Kedua, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011).

Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Chaidir Ali, **Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melawan Hukum**, (Jakarta:Mahkamah Agung, 2003).

Etty Mulyati, **Kredit Perbankan**, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).

Lilik Mulyadi, **Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya**, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2010).

Rusli Muhammad, **Hukum Acara Pidana Kontemporer**, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).

Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, (Yogyakarta:Universitas Atma Jaya, 2000).

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Laporan Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

**ARTIKEL INTERNET**

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturanojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Pelaporan-dan-Permintaan-Informasi-Debitur-melalui-Sistem-Layanan-Informasi-Kuangan>, diakses pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 19.00

Pedoman-penyusunan laporan debitur melalui system layanan informasi keuangan versi 6-16 januari 2017, diakses pada tanggal 20 Maret 2018, pukul 17.00.

